

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

#### 2.1 Kajian Pustaka

##### 2.1.1 Ruang Lingkup Auditing Internal

###### 2.1.1.1 Pengertian Auditing Internal

Menurut *The Institute of Internal Auditors (IIA)* (2024:7) yang diakses secara *online* definisi audit internal adalah :

“Audit internal adalah untuk memperkuat proses tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian, dampaknya melampaui organisasi itu sendiri. Audit internal berkontribusi terhadap stabilitas dan keberlanjutan organisasi secara keseluruhan dengan memberikan asurans atas efisiensi operasional, keandalan pelaporan, kepatuhan terhadap perundang-undangan, pengamanan aset, dan budaya etika.”

Menurut *Urton L. Anderson* (2017:1) yang diakses secara *online*, definisi audit internal adalah :

*“Internal auditing is an independent, objective assurance and consulting activity designed to add value and improve an organization’s operations. It helps an organization accomplish its objectives by bringing a systematic, disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of risk management, control, and governance processes.”*

Kutipan tersebut dapat diartikan bahwa, audit internal adalah kegiatan asurans dan konsultasi yang independen dan obyektif yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan operasi organisasi. Audit internal membantu organisasi mencapai tujuannya dengan menggunakan pendekatan yang sistematis dan disiplin

untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola.

Menurut *Sawyer's* (2019:10) dalam Jen Surya dan Ridwan Saleh (2020:16)

definisi audit internal adalah :

“Audit internal adalah suatu penilaian yang sistematis dan objektif yang dilakukan auditor internal terhadap operasi dan control yang berbeda-beda dalam organisasi.”

Menurut Sumarlin (2020:8) definisi audit internal adalah :

“Audit internal merupakan tahap pemeriksaan yang pengelolaannya dilaksanakan dengan netral di lingkungan perusahaan serta berbagai informasi dan laporan keuangan organisasi dalam melakukan pengujian dan evaluasi terhadap aktivitas yang dijalankan.”

Menurut *Alvin A. Arens, Randal J. Elder dan Mark S. Beasley* (2015:105)

definisi audit internal adalah :

“Audit internal adalah aktivitas konsultasi dan assurance yang objektif serta independen yang dirancang untuk menambah nilai dan memperbaiki operasi organisasi. Hal tersebut membantu organisasi untuk mencapai tujuannya dengan melakukan pendekatan yang sistematis dan berdisiplin untuk mengevaluasi serta meningkatkan etektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola.”

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas, dapat diinterpretasikan bahwa audit internal adalah proses independen memberikan layanan asuransi dan konsultasi untuk membantu meningkatkan kinerja organisasi. Dengan pendekatan yang terarah, audit internal mendukung pencapaian tujuan organisasi melalui evaluasi dan perbaikan pengelolaan risiko, pengendalian, dan tata kelola. Audit ini berfokus pada efisiensi operasional, keandalan laporan, kepatuhan hukum, perlindungan aset, dan penguatan etika kerja, sehingga mendorong keberlanjutan organisasi.

### 2.1.1.2 Jenis-jenis Auditing Internal

Menurut *Urton L. Anderson* (2017:7-12) yang diakses secara *online*, jenis-jenis audit internal adalah sebagai berikut :

1. *“Financial Audit*  
*Publicly traded companies in many countries are required by law or by stock exchange listing requirements to have their annual financial statements audited by independent external auditors. Internal auditors also provide assurance services over financial reporting. The main difference between internal and external financial reporting assurance services lies in their audience. Internal auditors primarily provide assurance for the benefit of management and the board of directors.*
2. *Performance Audit*  
*Performance audit engagements typically involve the review of organizational performance in terms of effectiveness and efficiency. That is, a performance audit assesses whether resources are being used in a manner that optimizes the achievement of the organization’s objectives. Performance audits are often associated with operational audits that aim to identify areas for improvement in business processes and resource allocation.*
3. *Compliance Audit*  
*Compliance audits assess whether the organization is adhering to applicable laws, regulations, contracts, and internal policies and procedures. A compliance audit engagement may focus on a particular area, such as environmental laws or employment regulations. Internal auditors often evaluate whether the organization’s policies align with the relevant regulatory requirements.*
4. *System Security Audit*  
*Cybersecurity refers to the technologies, processes, and practices designed to protect an organization’s information assets computers, networks, programs, and data from unauthorized access. Effective controls to address cybersecurity include a strong security framework, cybersecurity awareness programs, and robust response protocols in the event of a breach.*
5. *Due Diligence Audit*  
*Due diligence assignments involve evaluating risks before making major business decisions such as mergers, acquisitions, or investments. Internal auditing provides assurance and consulting services in support of management’s evaluation of an acquisition candidate.”*

Kutipan tersebut dapat diartikan :

1. “Audit keuangan

Perusahaan yang diperdagangkan secara publik di banyak negara diwajibkan oleh hukum atau oleh persyaratan bursa saham tempat mereka terdaftar untuk melakukan audit atas laporan keuangan tahunan mereka oleh auditor independen dari luar. Auditor internal juga menyediakan layanan asurans atas pelaporan keuangan. Perbedaan utama antara layanan asurans pelaporan keuangan internal dan eksternal adalah audiensnya. Auditor internal memberikan layanan asurans pelaporan keuangan terutama untuk kepentingan manajemen dan dewan direksi.

2. Audit kinerja

Audit ini menilai efektivitas dan efisiensi organisasi dalam mencapai tujuannya. Audit kinerja sering kali dikaitkan dengan audit operasional, yang bertujuan untuk mengidentifikasi area yang dapat ditingkatkan dalam proses bisnis dan alokasi sumber daya.

3. Audit kepatuhan

Audit ini dilakukan untuk memastikan organisasi mematuhi hukum, regulasi, kebijakan internal, dan standar industri. Auditor internal sering mengevaluasi apakah kebijakan yang diterapkan oleh organisasi selaras dengan persyaratan regulasi yang berlaku.

#### 4. Audit keamanan sistem

Keamanan siber (*cybersecurity*) mengacu pada teknologi, proses, dan praktik yang dirancang untuk melindungi aset informasi organisasi komputer, jaringan, program, dan data dari akses yang tidak sah. Pengendalian yang efektif untuk menangani keamanan siber mencakup kerangka kerja keamanan yang kuat, program peningkatan kesadaran keamanan siber, dan protokol respons yang tangguh dalam kasus pelanggaran keamanan

#### 5. Audit uji tuntas

Penugasan uji tuntas melibatkan evaluasi risiko sebelum membuat keputusan bisnis besar, seperti merger, akuisisi, atau investasi. Proses ini membantu organisasi mengidentifikasi potensi risiko keuangan, hukum, dan operasional.”

Menurut Faiz Zamzami et al. (2018:5) jenis-jenis audit internal adalah sebagai berikut :

##### 1. “Audit Keuangan

Audit keuangan adalah audit yang dilakukan terhadap transaksi, catatan akuntansi, dan laporan keuangan baik di tingkat bagian/departemen atau tingkat laporan keuangan perusahaan pusat. Pada aspek pengendalian, auditor memastikan transaksi tersebut telah diotorisasi, disajikan dalam catatan akuntansi, dan diungkapkan dalam laporan keuangan secara tepat dan akurat.

##### 2. Audit Nonkeuangan

###### a. Audit Kepatuhan

Audit kepatuhan dilakukan untuk menentukan apakah aktivitas dan/ atau entitas telah mematuhi hukum, peraturan, kebijakan, dan prosedur yang dibuat oleh organisasi dan oleh pihak-pihak yang mengikat, misalnya terkait peraturan pemerintah tentang kepatuhan perpajakan, upah minimum, dan lainnya. Auditor biasanya memberi rekomendasi untuk

perbaikan dalam pengendalian dan proses yang digunakan untuk mematuhi berbagai peraturan.

b. Audit Kinerja

Audit kinerja dilakukan untuk menentukan bagaimana suatu entitas/ unit kerja mengelola penggunaan sumber daya secara ekonomis, efektif, dan efisien dalam memenuhi misi dan tujuan entitas. Pengelolaan sumber daya yang dimaksud meliputi prosedur, proses, dan kinerja personel yang melaksanakan fungsi pengelolaan tersebut.

c. Tinjauan Struktur Pengendalian Internal

Audit yang bertujuan untuk menilai efektivitas dan efisiensi aktivitas unit kerja, keandalan proses pelaporan keuangan, kesesuaian dengan peraturan yang berlaku, dan pengamanan aset unit kerja. Audit ini dilaksanakan seiring dengan pelaksanaan audit keuangan bagi unit yang sudah membuat laporan keuangan dan dilaksanakan tersendiri bagi unit yang tidak memiliki kewajiban untuk membuat laporan keuangan.

d. Audit Pengadaan

Audit pengadaan adalah salah satu fungsi audit internal yang mengawasi pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa di lingkungan entitas. Pengawasan yang dilakukan oleh auditor internal meliputi seluruh proses pengadaan barang/jasa dari pemeriksaan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) sampai dengan penyerahan barang/jasa yang diminta. Audit fisik merupakan bagian dari audit kepatuhan dan lebih efektif untuk mencegah timbulnya kecurangan.

e. Audit Sistem Informasi

Audit ini bertujuan untuk menelaah pengendalian internal dari sistem informasi dan bagaimana orang menggunakan sistem tersebut. Audit yang dilakukan berupa evaluasi sistem *input*, *output* dan proses, *backup* dan *recovery plan*, sistem keamanan dan fasilitas sistem informasi. Audit dapat dilakukan pada sistem yang sudah ada maupun yang baru dikembangkan SKAI memberikan rekomendasi atas perbaikan sistem informasi yang digunakan.

3. Audit Tujuan Khusus

a. Follow Up Audit

Audit yang dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari hasil audit yang telah dilakukan sebelumnya. Audit ini dilakukan baik berdasarkan permintaan dari auditee maupun berdasarkan perintah dari entitas.

b. Audit Investigasi

Audit dilaksanakan jika terdapat indikasi adanya penggelapan, penyimpangan, dan/atau penyalahgunaan wewenang dalam suatu unit kerja yang menyebabkan timbulnya kerugian pada entitas. Audit ini juga dilaksanakan apabila terdapat indikasi adanya tindak pidana atau perdata dalam unit kerja.

c. Audit Identifikasi

Audit ini dilaksanakan untuk mengidentifikasi unit-unit kerja yang berada di bawah organisasi, atau memakai nama organisasi namun belum jelas posisinya dalam organisasi. Tujuan dari audit identifikasi adalah untuk memastikan keberadaan unit kerja di bawah organisasi telah memiliki legitimasi baik prosedural maupun fungsional yang membawa identitas organisasi.”

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas, dapat diinterpretasikan bahwa jenis-jenis audit internal meliputi audit keuangan untuk menilai keandalan informasi akuntansi, audit kinerja untuk mengevaluasi efisiensi dan pencapaian tujuan, serta audit kepatuhan guna memastikan aktivitas sesuai aturan dan kebijakan. Ada juga audit sistem informasi yang meninjau pengendalian dan keamanan data, audit keamanan sistem untuk melindungi aset informasi dari ancaman siber, serta audit pengadaan yang mengawasi proses pembelian barang dan jasa. Selain itu, audit uji tuntas dilakukan sebelum keputusan bisnis penting, dan audit tujuan khusus mencakup tindak lanjut audit sebelumnya, penyelidikan penyimpangan, serta peninjauan keberadaan unit kerja dalam organisasi.

### 2.1.1.3 Tujuan Auditing Internal

Menurut *The Institute of Internal Auditors (IIA)* (2024:15) yang diakses secara *online* tujuan audit internal, yaitu :

“Tujuan audit internal memperkuat kemampuan organisasi untuk menciptakan, melindungi, dan mempertahankan nilai dengan memberikan asurans, advis, wawasan, dan pandangan ke depan, yang independen, berbasis risiko, dan objektif kepada dewan dan manajemen. Audit internal meningkatkan :

1. Keberhasilan pencapaian tujuan organisasi.
2. Proses tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian dalam organisasi.

3. Pengambilan keputusan dan pengawasan dalam organisasi.
4. Reputasi dan kredibilitas dengan pemangku kepentingan organisasi.
5. Kemampuan organisasi untuk melayani kepentingan publik.”

Menurut Jen Surya dan Ridwan Saleh (2020:20) tujuan audit internal, yaitu :

“Tujuan audit internal adalah untuk mengidentifikasi kegiatan, program dan aktivitas yang masih memerlukan perbaikan, sehingga dengan rekomendasi yang diberikan nantinya dapat dicapai perbaikan atas pengelolaan berbagai program dan aktivitas pada perusahaan tersebut. Keberadaan Auditor Internal dalam perusahaan dengan tujuan untuk membantu manajemen dalam rangka mengendalikan operasi perusahaan agar dapat mencapai tidak hanya ekonomis, efisien dan efektif juga terbebas dari risiko.”

Menurut Ardianingsih dan Setiawan (2023:3) tujuan audit internal, yaitu :

“Tujuan audit internal adalah membantu unit kerja dalam kegiatan operasional perusahaan untuk mengelola risiko dengan mengidentifikasi masalah, kemudian menyarankan perbaikan yang memberi nilai tambah untuk memperkuat organisasi.”

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas, dapat diinterpretasikan bahwa tujuan audit internal untuk mendukung organisasi dalam mencapai target dengan memberikan evaluasi dan saran berbasis risiko. Perannya mencakup peningkatan tata kelola, manajemen risiko, serta pengambilan keputusan agar operasional lebih efisien dan minim risiko.

#### **2.1.1.4 Standar Auditing Internal**

Menurut *The Institute of Internal Auditors (IIA) Tentang Etik dan Profesionalisme* (2024:17) yang diakses secara *online* standar audit internal adalah :

1. “Mendemonstrasikan Integritas  
Auditor internal mendemonstrasikan integritas dalam pekerjaan dan perilaku mereka. Sederhananya, auditor internal diharapkan untuk mengatakan

kebenaran dan melakukan hal yang benar, meskipun hal tersebut tidak nyaman atau sulit.

2. Mempertahankan Objektivitas  
Auditor internal mempertahankan sikap tidak memihak dan tidak bias ketika melakukan jasa audit internal dan mengambil keputusan.
3. Mendemonstrasikan Kompetensi  
Auditor internal menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan untuk memenuhi peran dan tanggung jawabnya dengan sukses. Mendemonstrasikan kompetensi memerlukan pengembangan dan penerapan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan untuk memberikan jasa audit internal.
4. Menerapkan Kecermatan Profesional  
Auditor internal menerapkan kecermatan profesional dalam merencanakan dan melaksanakan jasa audit internal. Standar yang mencakup penerapan kecermatan profesional mensyaratkan :
  - a. Kesesuaian dengan *Standar Audit Internal Global*.
  - b. Pertimbangan sifat, keadaan, dan persyaratan pekerjaan yang akan dilakukan.
  - c. Penerapan skeptisisme profesional untuk menilai dan mengevaluasi informasi secara kritis.
5. Menjaga Kerahasiaan  
Auditor internal menggunakan dan melindungi informasi dengan tepat. Auditor internal harus menghormati nilai dan kepemilikan informasi yang mereka terima dengan menggunakannya hanya untuk tujuan profesional dan melindunginya dari pihak yang tidak memiliki kewenangan terhadap akses atau pengungkapan, baik secara internal maupun eksternal.”

Sedangkan menurut Hery (2017:266) standar audit internal adalah :

1. “Independensi  
Auditor Internal harus mandiri dan terpisah dari berbagai kegiatan yang diperiksa. Auditor internal dianggap mandiri apabila dapat melaksanakan pekerjaan secara bebas dan objektif.
2. Kemampuan Profesional  
Audit Internal harus dilaksanakan secara ahli dan dengan ketelitian profesional. Kemampuan professional wajib dimiliki oleh setiap auditor internal.
3. Lingkup Pekerjaan  
Lingkup pekerjaan audit internal meliputi pengujian dan evaluasi terhadap kecukupan dan keefektifan sistem pengendalian internal yang dimiliki oleh organisasi. Lingkup pekerjaan audit internal ditetapkan dalam standar profesional audit internal meliputi pemeriksaan apa saja yang harus

dilaksanakan. Meninjau kecukupan suatu sistem audit internal, apakah sistem yang ditetapkan telah memberikan kepastian yang layak atau masuk akal.

#### 4. Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan

Kegiatan pemeriksaan meliputi perencanaan pemeriksaan, pengujian, dan pengevaluasian informasi, penyampaian hasil pemeriksaan, dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan. Auditor internal bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan tugas pemeriksaan yang harus disetujui dan ditinjau oleh pengawas.”

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas, dapat diinterpretasikan bahwa standar audit internal mencakup kejujuran, sikap objektif, kemampuan, dan ketelitian dalam menjalankan tugas. Auditor wajib menjaga kerahasiaan data, bersikap mandiri, dan memiliki keahlian yang memadai. Proses audit mencakup perencanaan, pengujian, penilaian, pelaporan, dan tindak lanjut. Ruang lingkupnya mencakup penilaian atas efektivitas pengendalian internal dan memastikan sistem yang ada sudah memadai untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi.

#### **2.1.1.5 Jenis-jenis Auditor Internal**

Menurut Jen Surya dan Ridwan Saleh (2020:23) jenis-jenis auditor internal adalah sebagai berikut :

1. “Auditor Keuangan  
Auditor keuangan menganalisis aktivitas ekonomis yang diukur dan dilaporkan oleh bagian akuntansi. Bagi Auditor Internal, audit keuangan merupakan langkah untuk mereview tentang “keandalan dan integritas informasi akuntansi dan pengamanan aset (kekayaan organisasi)”.
2. Auditor Ketaatan  
Auditor ketaatan mereview kendali keuangan dan operasi serta transaksi untuk menentukan apakah auditan (pihak yang diaudit) mengikuti peraturan, hukum dan standar dan prosedur yang telah ditetapkan. Hasil dari audit ini berupa pernyataan apakah pelaksanaan aktivitas telah sesuai atau belum sesuai disertai dengan konsekuensi (*follow up*) yang ditetapkan.

3. Auditor Operasional  
Auditor operasional mereview secara komprehensif (menyeluruh) atas berbagai fungsi atau aktivitas organisasi untuk menilai ekonomisasi, efisiensi dan efektifitas untuk mencapai tujuan. Hasil dari pelaksanaan audit ini berupa temuan yang diikuti oleh saran atau rekomendasi untuk memperbaiki permasalahan yang ada, kemudian ditindak lanjuti dengan pemantauan (monitoring) atas rekomendasi yang telah diberikan.
4. Auditor Pengendalian Sistem Informasi  
Auditor pengendalian melakukan review sistem informasi meliputi review dari sistem informasi, termasuk pengendalian umum, pengendalian aplikasi, dan pemulihan bencana. Hal tersebut dilakukan untuk mengevaluasi kualitas kontrol dan perlindungan atas sumber daya teknologi informasi dari organisasi atau perusahaan. Auditor ini biasanya meninjau penggunaan sumber daya secara efektif teknologi informasi, kepatuhan terhadap kebijakan manajemen, dan mendorong desain dan implementasi pengendalian yang memadai atas aplikasi komputer dan lingkungan komputasi yang mereka gunakan.
5. Auditor Tindak Lanjut Temuan  
Auditor bertugas mengatasi, memperbaiki, dan menindaklanjuti temuan audit (hasil audit) sebelumnya, baik hasil audit yang diperoleh dari audit eksternal maupun audit internal.
6. Auditor Khusus  
Auditor ini meliputi investigasi laporan internal dan eksternal serta setiap jenis laporan yang sama untuk dilakukan investigasi, terlepas dari sumbernya. Investigasi sering diminta oleh manajemen dan fokus pada dugaan, perilaku tidak teratur. Investigasi dilakukan untuk memastikan pencurian internal, penyalahgunaan penggunaan aset, serta konflik kepentingan.”

Sedangkan menurut *Urton L. Anderson* (2017:9) yang diakses secara *online*,

jenis-jenis auditor internal dilihat dari struktur organisasi adalah sebagai berikut :

1. *“Staff auditor or IT staff auditor. Staff auditors are responsible for performing the fieldwork on financial, operational, compliance, and information system engagements in accordance with the established audit schedule for the purpose of determining the accuracy of financial records, effectiveness of business practices, and compliance with policies, procedures, laws, and regulations.*
2. *Senior auditor or IT senior auditor (sometimes referred to as an in-charge auditor). In addition to the responsibilities listed above, senior auditors are responsible for the planning stages of an engagement, guiding staff auditors in their fieldwork, ensuring that engagement timelines are met, reviewing the workpapers prepared by the staff auditors, assisting in the preparation of*

- engagement communications, performing the wrap-up steps of the engagement, and evaluating the staff auditors' performance.*
3. *Audit manager or IT audit manager. Audit managers supervise and administer engagements in accordance with the established audit schedule. Additionally, audit managers assist in the development and maintenance of the annual internal audit plan and risk model for assigned areas, issue engagement communications, and supervise senior auditors.*
  4. *Audit director or IT audit director. Audit director positions may exist in larger internal audit functions. In addition to the responsibilities listed above, audit directors assist with the development of the overall internal audit strategy and planning, including the presentation and review of the internal audit strategy, mission, charter, and plan with the audit committee and senior management. Audit directors also supervise audit managers and are responsible for hiring and terminating internal audit associates.*
  5. *Chief audit executive. The CAE develops, directs, organizes, monitors, plans, and administers the internal audit plan and budget, as approved by the audit committee, for the purpose of determining the accuracy of financial records, effectiveness of business practices, and compliance with applicable policies, procedures, laws, and regulations. The CAE also directly supervises the internal audit management team (audit directors and managers), oversees the entire internal audit function, and approves the hiring and termination of internal auditors."*

Kutipan tersebut dapat diartikan :

1. "*Staff Auditor atau IT Staff Auditor*, bertanggung jawab untuk melakukan pekerjaan lapangan dalam audit keuangan, operasional, kepatuhan, dan sistem informasi. Mereka melaksanakan audit sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan untuk menentukan keakuratan catatan keuangan, efektivitas praktik bisnis, serta kepatuhan terhadap kebijakan, prosedur, hukum, dan regulasi.
2. *Senior Auditor atau IT Senior Auditor*, yang disebut sebagai *in-charge auditor*, memiliki tanggung jawab tambahan selain tugas yang dilakukan oleh auditor staf. Auditor senior bertanggung jawab untuk merencanakan tahapan audit, membimbing auditor staf dalam pekerjaan lapangan mereka,

memastikan tenggat waktu audit terpenuhi, meninjau dokumen kerja yang dibuat oleh auditor staf, membantu dalam persiapan komunikasi hasil audit, melaksanakan langkah-langkah penyelesaian audit, dan mengevaluasi kinerja auditor staf.

3. *Audit Manager atau IT Audit Manager*, bertugas mengawasi dan mengelola audit sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Selain itu, mereka membantu dalam pengembangan dan pemeliharaan rencana audit tahunan dan model risiko untuk area yang ditugaskan, menerbitkan laporan komunikasi audit, serta mengawasi auditor senior dalam menjalankan tugasnya. Audit
4. *Director atau IT Audit Director*, biasanya ada di organisasi dengan fungsi audit internal yang lebih besar. Selain menjalankan tugas manajer audit, direktur audit membantu dalam mengembangkan strategi dan perencanaan audit internal secara keseluruhan. Mereka juga bertanggung jawab untuk mempresentasikan dan meninjau strategi audit, misi, piagam audit, serta rencana audit dengan komite audit dan manajemen senior. Selain itu, mereka mengawasi manajer audit dan bertanggung jawab atas rekrutmen serta pemutusan hubungan kerja auditor internal.
5. *Chief Audit Executive (CAE)*, memiliki peran yang lebih strategis dalam organisasi. Mereka bertanggung jawab untuk mengembangkan, mengarahkan, mengorganisasi, memonitor, merencanakan, dan mengelola rencana serta anggaran audit internal yang telah disetujui oleh komite audit. Selain itu, CAE memastikan keakuratan catatan keuangan, efektivitas praktik bisnis, serta

kepatuhan terhadap kebijakan, prosedur, hukum, dan regulasi. Mereka juga mengawasi tim manajemen audit internal yang terdiri dari direktur audit dan manajer audit, serta memiliki kewenangan untuk menyetujui perekrutan dan pemutusan hubungan kerja auditor internal.”

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas, dapat diinterpretasikan bahwa jenis-jenis auditor internal dibedakan berdasarkan peran dan struktur jabatan. Berdasarkan perannya, terdapat auditor keuangan yang mengevaluasi keandalan informasi akuntansi dan perlindungan aset, auditor ketaatan yang menilai kepatuhan terhadap aturan, auditor operasional yang mengukur efisiensi dan efektivitas, auditor sistem informasi yang memeriksa pengendalian teknologi, auditor tindak lanjut yang menangani hasil audit, dan auditor khusus yang menyelidiki dugaan penyimpangan. Dari sisi jabatan, struktur terdiri dari staf auditor yang melakukan audit lapangan, auditor senior yang membimbing dan mengawasi pelaksanaan audit, manajer audit yang mengelola audit dan menyusun rencana kerja, direktur audit yang merancang strategi audit internal, dan CAE yang memimpin fungsi audit di tingkat strategis.

## **2.1.2 Peran Komite Audit**

### **2.1.2.1 Pengertian Komite Audit**

Menurut Alvin A. Arens, Randal J. Elder dan Mark S. Beasley (2015:78), pengertian komite audit adalah :

“Komite audit adalah sejumlah anggota dewan direksi perusahaan yang dipilih yang tanggung jawabnya termasuk membantu auditor tetap independen dari

manajemen. Sebagian besar komite audit terdiri dari tiga hingga lima atau kadang-kadang sebanyak bahkan direktur yang bukan bagian dari manajemen perusahaan.”

Menurut Bonifasius H.Tambunan (2021:120) pengertian komite audit adalah :

“Komite Audit adalah Komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dan dewan pengawas untuk membantu dewan komisaris dan dewan pengawas yang bertugas menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilakukan oleh satuan pengawas internal maupun auditor eksternal, memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya memastikan telah terdapat prosedur review yang memuaskan segala informasi hal-hal yang memerlukan perhatian dewan komisaris dan dewan pengawas serta tugas-tugas dewan pengawas lainnya.”

Menurut Erfan Effendi (2021:7) pengertian komite audit adalah :

“Komite audit adalah bagian yang dibentuk oleh dewan komisaris dalam suatu perusahaan untuk membantu melaksanakan tugas dan fungsinya. Komite audit diketuai oleh dewan komisaris independen yang beranggotakan minimal 3 orang terdiri dari komisaris independen dan pihak dari luar perusahaan.”

Menurut Sarbanes Oxley Act (2002:3) Pasal 301 dalam Dewi Indriasih (2020:36) pengertian komite audit adalah :

"Komite audit adalah komite (atau setara) yang dibentuk oleh dewan direksi emiten dan antara itu untuk mengawasi proses akuntansi dan pelaporan keuangan emiten. Emiten dan laporan keuangan emiten mengaudit; jika tidak ada komite yang terkait dengan emiten, seluruh dewan direksi emiten".

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas, dapat diinterpretasikan bahwa komite audit adalah bagian yang dibentuk oleh dewan komisaris atau pengawas untuk membantu menjalankan fungsi pengawasan. Tugasnya mencakup menilai hasil audit internal dan eksternal, memberi masukan terkait perbaikan sistem pengendalian, serta memastikan informasi penting ditinjau dengan benar.

### 2.1.2.2 Pentingnya Komite Audit

Menurut Eko Sudarmanto (2021:44) pentingnya komite audit adalah :

“Komite Audit berperan penting dalam membantu Dewan Komisaris untuk memastikan bahwa:

- 1) Laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum,
- 2) Struktur pengendalian internal perusahaan dilaksanakan dengan baik,
- 3) Pelaksanaan audit internal maupun eksternal dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku, dan
- 4) Tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen.”

Menurut Bonifasius H. Tambunan (2021:119) pentingnya komite audit adalah sebagai berikut:

“Komite audit menjadi perangkat utama dalam penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG). Komite audit mempunyai peran penting dalam fungsi pengawasan dan pengendalian internal perusahaan. Berikut peran lengkap komite audit:

1. Pemenuhan GCG pada perusahaan, dengan adanya komite audit diharapkan mampu meningkatkan mutu pengawasan pada perusahaan yang mampu memberikan perlindungan dan keamanan bagi para pemegang saham. Komite audit ini membantu deawan komisaris serta untuk mewujudkan perusahaan yang Good Corporate Governance (GCG).
2. Berperan dalam menerapkan Enterprise Risk Management (ERM) yang berhubungan dengan metode dan prinsip mengenai pengelolaan risiko serta peluang untuk mencapai tujuan perusahaan. Ikut mengatur risiko serta mengidentifikasi peristiwa dan juga dampak yang ditimbulkan pada keadaan tertentu perusahaan. Untuk peran dalam ERM sendiri lebih lengkap terkandung dalam piagam komite audit masing-masing.
3. Sebagai Mitra Auditor Internal yang membantu tugas Satuan Pengawasan Internal (SPI) dalam melakukan audit internal.
4. Memberi nilai tambah bagi auditor internal untuk memuaskan dan menyusun laporan keuangan untuk direktur utama.”

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas, dapat diinterpretasikan bahwa pentingnya komite audit dalam mengawasi berbagai aspek perusahaan, seperti memastikan laporan keuangan telah disusun sesuai standar yang berlaku, sistem

pengendalian internal berjalan dengan baik, dan proses audit baik internal maupun eksternal dilakukan secara tepat. Selain itu, keberadaan komite ini juga mendukung penerapan tata kelola perusahaan yang sehat, membantu mengidentifikasi serta mengelola risiko, dan memberikan dukungan terhadap kegiatan audit internal guna meningkatkan keandalan pelaporan keuangan.

### **2.1.2.3 Kompetensi dan Independensi Komite Audit**

Menurut Dewi Indriasih (2020:39) kompetensi komite audit, yaitu :

“Kompetensi komite audit terletak di tugasnya, tugas komite audit adalah memantau dan mengevaluasi laporan keuangan, artinya komite audit harus memiliki kemampuan akuntansi keuangan. Di Indonesia, salah satu aturan mengenai persyaratan kualifikasi komite audit dalam SK Bapepam No. Kep29 / PM / 2004 mengatur:

- 1) Mempunyai integritas, skill, knowledge serta pengalaman mumpuni, serta mampu berkomunikasi secara tepat sesuai dengan latar belakang pendidikannya;
- 2) Latar belakang pendidikan komite audit merupakan akuntansi atau tentang keuangan;
- 3) Mempunyai knowledge pengetahuan yang cukup dalam membaca ataupun membuat laporan keuangan;
- 4) Memahami sepenuhnya peraturan undangundang serta peraturan lainnya di bidang pasar modal;
- 5) Tidak dari kantor akuntan publik, perusahaan konsultan ukum atau berbagai pihak lain yang memberikan jasa audit, jasa non audit dan serta jasa konsultasi lainnya kepada Emiten atau Perusahaan Terbuka.”

Selain itu, menurut Alvin A. Arens, Randal J. Elder dan Mark S. Beasley

(2015:88) independensi komite audit, yaitu :

1. “Mengawasi kinerja auditor eksternal dan internal, memastikan bahwa audit dilakukan sesuai dengan standar profesional dan tanpa konflik kepentingan.

2. Menjadi penghubung antara auditor dan dewan direksi, memungkinkan komunikasi yang transparan mengenai temuan audit dan isu-isu yang mungkin timbul selama proses audit.
3. Membantu dalam penunjukan dan remunerasi auditor eksternal, memastikan bahwa auditor yang dipilih memiliki kualifikasi yang sesuai dan dapat bekerja secara independen.”

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas, dapat diinterpretasikan bahwa kompetensi dan independensi komite audit berperan penting dalam mengawasi auditor eksternal dan internal untuk memastikan audit sesuai standar dan tanpa konflik kepentingan, memfasilitasi komunikasi antara auditor dan direksi, serta membantu penunjukan dan remunerasi auditor eksternal yang independen. Komite audit harus memiliki keahlian akuntansi, memahami peraturan pasar modal, dan menghindari konflik kepentingan.

#### **2.1.2.4 Aktivitas, Tugas Pokok dan Fungsi Komite Audit**

Menurut Alvin A. Arens, Randal J. Elder dan Mark S. Beasley (2015:79)

aktivitas komite audit adalah :

1. “Peran sebagai penghubung antara auditor eksternal dan dewan komisaris  
Komite audit bertanggung jawab untuk memastikan bahwa auditor eksternal memiliki jalur komunikasi yang terbuka dan bebas tekanan dengan pihak pengawas tertinggi perusahaan. Mereka menjadi perantara agar auditor dapat menyampaikan temuan dan permasalahan yang sensitif tanpa tekanan dari manajemen.
2. Tinjauan dan persetujuan atas ruang lingkup audit  
Komite audit turut meninjau dan menyetujui ruang lingkup serta pendekatan audit yang direncanakan oleh auditor eksternal, termasuk diskusi atas risiko-risiko signifikan dalam audit.
3. Evaluasi independensi dan kinerja auditor eksternal  
Komite audit bertugas untuk menilai apakah auditor independen benar-benar bebas dari pengaruh manajemen, serta menilai kinerja mereka secara periodik, bahkan memberikan rekomendasi terkait pemilihan atau penggantian auditor.

4. Peninjauan atas laporan keuangan  
Komite audit menelaah laporan keuangan tahunan sebelum dipublikasikan, guna memastikan bahwa laporan disajikan secara wajar dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.
5. Pengawasan atas pengendalian internal  
Komite audit juga bertanggung jawab dalam membantu mengawasi sistem pengendalian internal perusahaan, terutama yang berkaitan dengan pelaporan keuangan dan kepatuhan terhadap regulasi.”

Menurut Dewi Indriasih (2020:39) aktivitas komite audit adalah :

“Pelaksanaan tanggung jawab komite audit dapat diwakili oleh jumlah keikutsertaan dalam rapat yang diadakan oleh komite audit dalam satu tahun. Selain itu, aktivitas komite audit dapat dilihat dari pelaksanaan tugasnya dalam memastikan audit internal berjalan dengan benar, dan melakukan pelaporan secara rutin.”

Menurut Alvin A. Arens, Randal J. Elder dan Mark S. Beasley (2015:79)

tugas pokok komite audit adalah :

1. “Mengawasi proses pelaporan dan pengungkapan keuangan.
2. Meninjau rencana audit, temuan audit yang signifikan, dan tanggapan manajemen.
3. Berfungsi sebagai saluran komunikasi utama antara auditor dan dewan komisaris (tanpa campur tangan manajemen).”

Menurut Erfan Effendi (2021:7) tugas pokok komite audit adalah :

“Tugas pokok dari komite audit adalah membantu dewan komisaris dalam melakukan fungsi pengawasan atas kinerja perusahaan. Hal tersebut terutama berkaitan dengan review system pengendalian intern perusahaan, memastikan kualitas laporan keuangan dan meningkatkan efektivitas audit.

Menurut Alvin A. Arens, Randal J. Elder dan Mark S. Beasley (2015:80-81)

fungsi komite audit adalah :

1. “Mengawasi proses pelaporan keuangan dan pengungkapan fungsi pengawasan (*oversight function*)
2. Menjadi penghubung antara auditor eksternal dan board of directors
3. Menelaah dan menanggapi rencana audit dan hasil audit
4. Menjaga independensi auditor eksternal dari tekanan manajemen
5. Mendukung sistem pengendalian internal.”

Menurut Bonifasius H. Tambunan (2021:120) fungsi komite audit adalah :

1. “Menjamin Keterbukaan dan Pertanggungjawaban  
Komite audit bertugas memastikan bahwa laporan keuangan perusahaan disusun secara jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap manajemen.
2. Menjaga Kemandirian  
Pengawasan Untuk melaksanakan fungsi pengawasan secara optimal, komite audit harus tetap independen agar dapat menilai serta mengkaji kebijakan dan praktik perusahaan secara objektif, tanpa adanya benturan kepentingan.
3. Mendorong Kepatuhan terhadap Prinsip GCG  
Dengan menjalankan tugasnya, komite audit berperan dalam memastikan perusahaan menerapkan prinsip tata kelola yang baik, seperti keadilan, tanggung jawab, transparansi, dan akuntabilitas.”

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas, dapat diinterpretasikan bahwa aktivitas, tugas pokok, dan fungsi komite audit mendukung pengawasan internal perusahaan. Aktivitas tercermin dari partisipasi dalam rapat, tugas utamanya membantu dewan komisaris mengawasi operasional, menilai pengendalian internal, memastikan laporan keuangan benar, serta meningkatkan efektivitas audit. Komite audit mendorong tata kelola perusahaan dengan menjaga independensi, akuntabilitas, transparansi, serta memastikan kepatuhan terhadap prinsip yang berlaku.

#### **2.1.2.5 Jumlah Komite Audit yang disarankan**

Menurut Dewi Indriasih (2020:36) jumlah komite adalah sebagai berikut :

“Komposisi komite audit minimal 3 orang, termasuk mayoritas anggota independen yang berasal dari luar organisasi. Komite tersebut memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa proses audit internal sudah dijalankan dengan benar.”

Selain itu, menurut Eko Sudarmanto (2021:44) jumlah komite audit, yaitu :

“Jumlah anggota Komite Audit harus disesuaikan dengan kompleksitas Perusahaan dengan tetap memperhatikan efektivitas dalam pengambilan keputusan. Bagi perusahaan yang sahamnya tercatat di bursa efek, perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan yang menghimpun dan mengelola dana masyarakat, perusahaan yang produk atau jasanya digunakan oleh masyarakat luas, serta perusahaan yang mempunyai dampak luas terhadap kelestarian lingkungan, komite audit diketuai oleh komisaris independen dan anggotanya dapat terdiri dari komisaris atau pelaku profesi dari luar perusahaan. Serta salah seorang anggota memiliki latar belakang dan kemampuan akuntansi dan atau keuangan.”

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas, dapat diinterpretasikan bahwa jumlah komite audit minimal tiga anggota, mayoritas dari luar organisasi untuk menjaga objektivitas. Jumlah anggota disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan agar pengambilan keputusan efektif. Pada perusahaan terbuka, perusahaan negara, atau berdampak luas, komite dipimpin komisaris independen dan dapat melibatkan pihak eksternal. Setidaknya satu anggota harus memiliki keahlian di bidang akuntansi atau keuangan.

### **2.1.3 Kompetensi Auditor Internal**

#### **2.1.3.1 Pengertian Kompetensi Auditor Internal**

Menurut *The Institute of Internal Auditors (IIA)* (2024:26) yang diakses secara *online* pengertian kompetensi auditor internal adalah :

“Auditor internal harus memiliki atau memperoleh kompetensi untuk melaksanakan tanggung jawabnya dengan sukses. Kompetensi yang dibutuhkan mencakup pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang sesuai dengan posisi pekerjaan dan tanggung jawab seseorang sesuai dengan tingkat pengalamannya.”

Menurut *Urton L. Anderson* (2017:19) yang diakses secara *online*, pengertian kompetensi auditor internal adalah :

*“Internal auditors must possess the knowledge, skills, and other competencies needed to perform their individual responsibilities. The internal audit activity collectively must possess or obtain the knowledge, skills, and other competencies needed to perform its responsibilities.”*

Kutipan tersebut dapat diartikan bahwa, auditor internal harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi lain yang dibutuhkan untuk melaksanakan tanggung jawab masing-masing. Aktivitas audit internal secara keseluruhan harus memiliki atau memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi lain yang dibutuhkan untuk melaksanakan tanggung jawabnya.

Menurut *Ardianingsih dan Setiawan* (2023:105) pengertian kompetensi auditor internal adalah :

*“Kompetensi auditor internal adalah keterampilan yang diperlukan dalam melakukan audit internal secara efektif.”*

Menurut *Alvin A. Arens, Randal J. Elder dan Mark S. Beasley* (2015:388) Tentang Pengendalian Internal dan Kerangka Kerja COSO pengertian kompetensi auditor internal adalah :

*“Kompetensi auditor internal merupakan kebutuhan bagi auditor yang didapat melalui pendidikan formal dalam bidang audit dan akuntansi, maupun melalui pengalaman kerja serta pendidikan professional.”*

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas, dapat diinterpretasikan bahwa kompetensi auditor internal adalah kombinasi pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya dengan baik. Setiap auditor perlu memiliki kemampuan sesuai peran dan pengalaman, sementara unit audit secara

keseluruhan harus memiliki keahlian yang cukup untuk melaksanakan tanggung jawabnya secara menyeluruh.

### 2.1.3.2 Karakteristik Kompetensi Auditor Internal

Menurut *The Institute of Internal Auditors (IIA) Tentang Etik dan Profesionalisme (2024:33)* yang diakses secara *online* karakteristik auditor internal, yaitu :

1. “Menjaga sikap rasa ingin tahu.
2. Menilai secara kritis keandalan informasi.
3. Bersikap lugas dan jujur ketika menyampaikan kekhawatiran dan mengajukan pertanyaan tentang informasi yang tidak konsisten.
4. Mencari bukti tambahan untuk membuat penilaian tentang informasi dan pernyataan yang mungkin tidak lengkap, tidak konsisten, salah, atau menyesatkan.”

Menurut Ardianingsih dan Setiawan (2023:142) karakteristik kompetensi auditor internal, yaitu :

1. “Mutu personal dalam menjalankan tugasnya, seorang auditor harus memiliki mutu personal yang baik, seperti:
  - a. Rasa ingin tahu (*inquisitive*)
  - b. Mampu menangani ketidakpastian
  - c. Menyadari bahwa beberapa temuan dapat bersifat subjektif
2. Pengetahuan umum  
Seorang auditor harus memiliki pengetahuan umum untuk memahami entitas yang akan diaudit dan membantu pelaksanaan audit. Pengetahuan dasar ini meliputi kemampuan untuk melakukan review analisis (*analytical review*), pengetahuan teori organisasi untuk memahami suatu organisasi, pengetahuan auditing, dan pengetahuan tentang sektor publik.
3. Keahlian khusus  
Keahlian khusus yang harus dimiliki antara lain keahlian untuk melakukan wawancara, kemampuan membaca cepat, keterampilan menggunakan computer (minimal mampu mengoperasikan *word processing* dan *spreadsheet*). Serta mampu menulis dan mempresentasikan laporan dengan baik.”

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas, dapat diinterpretasikan bahwa karakteristik kompetensi auditor internal harus memiliki rasa ingin tahu, berpikir kritis terhadap informasi, serta bersikap jujur saat menilai data yang tidak konsisten. Mereka juga dituntut mampu menghadapi ketidakpastian dan menyadari adanya unsur subjektif dalam temuan. Pengetahuan dasar tentang organisasi, audit, dan analisis diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas. Selain itu, auditor perlu memiliki keahlian teknis seperti wawancara, membaca cepat, mengoperasikan perangkat lunak, serta menyusun dan menyampaikan laporan dengan jelas.

### **2.1.3.3 Indikator Kompetensi Aditor Internal**

Menurut Faiz Zamzami et al. (2018:11) indikator kompetensi auditor internal, adalah :

1. “Menjalankan jasa jika auditor memiliki pengetahuan, keahlian, dan pengalaman yang dibutuhkan;
2. Menjalankan jasa audit internal sesuai dengan standar praktik professional audit internal; dan
3. Meningkatkan keahlian maupun efektivitas serta kualitas jasa audit secara terus menerus.”

Menurut Ardianingsih dan Setiawan (2023:106) indikator kompetensi auditor internal adalah sebagai berikut:

1. “Kemampuan wawancara  
Kemampuan wawancara saat pemeriksaan auditor diperlukan. Saat pelaksanaan audit, auditor akan bertemu berbagai tipe orang yang mungkin sudah lelah dengan segala jenis pekerjaan dan tekanan target. Auditor internal harus menguasai berbagai teknik wawancara agar tidak menimbulkan kesalahan komunikasi, baik dari sumber audit maupun auditor sendiri.

2. Keterampilan analitis  
Keahlian analitis auditor internal adalah kompetensi utama yang dapat membantu keputusan audit internal untuk dikembangkan secara konsisten dan terorganisir. Auditor internal harus menggunakan analisis untuk menggambarkan penggunaan pendekatan keputusan yang terdokumentasi dengan baik.
3. Keterampilan menguji dan menganalisis  
Keterampilan analitis mengacu pada kemampuan untuk memvisualisasikan, mengartikulasikan, serta memecahkan masalah dan konsep yang kompleks, hingga sampai pada keputusan masuk akal berdasarkan informasi yang tersedia. Keterampilan tersebut meliputi kemampuan untuk menerapkan pemikiran logis dalam mengumpulkan dan menganalisis informasi, merancang dan menguji solusi untuk masalah, serta merumuskan rencana. Keterampilan analitis bagi auditor internal diuji ketika auditor diminta untuk mencari ketidakkonsistenan dalam beberapa laporan produksi, untuk menempatkan serangkaian peristiwa dalam urutan yang tepat, atau untuk membaca secara kritis laporan status proyek dan mengidentifikasi potensi kesalahan..
4. Keterampilan mendokumentasikan  
Auditor internal memiliki kebutuhan berkelanjutan untuk mengembangkan keterampilan dokumentasi kerja audit yang kuat. Semua auditor internal harus mengembangkan keterampilan dan kompetensi yang kuat dalam mendokumentasikan setiap aspek pekerjaan mereka. Auditor internal harus selalu mengingat bahwa dokumentasinya di semua tingkatan dapat dikenakan ulasan atau pengungkapan lain.
5. Merekomendasikan hasil dan tindakan korektif  
Auditor internal di semua tingkatan harus mengembangkan kompetensi untuk merekomendasikan sebagian besar pekerjaan mereka. Auditor internal dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan istilah yang cukup jelas dan sederhana, sehingga penerima dapat memahami masalah dan sifat tindakan korektif yang disarankan. Konsep ini akan sangat sulit jika temuan audit mencakup area yang kompleks atau berpotensi tidak jelas.
6. Keterampilan berkomunikasi  
Auditor harus tetap konsisten untuk menyempatkan diri berkomunikasi dengan auditee saat melakukan atau setelah selesai melakukan review.
7. Keterampilan bernegosiasi  
Auditor internal di tiap tingkatan harus memiliki keterampilan bernegosiasi dalam menyelesaikan laporan audit dan menyiapkan rekomendasi.
8. Komitmen untuk belajar  
Auditor internal harus senantiasa belajar dan mengemban tanggung jawab moralnya untuk mengembangkan diri dan teguh kepada profesionalisme. Selalu fokus memberi nilai kepada stakeholders dan melakukan role sesuai nilai-nilai best practice standar.”

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas, dapat diinterpretasikan bahwa indikator kompetensi auditor internal meliputi pengetahuan, keahlian, dan pengalaman yang mendukung pelaksanaan tugas serta kepatuhan terhadap standar audit. Auditor perlu terus meningkatkan kualitas audit. Keterampilan wawancara, analitis, serta pengujian dan analisis data sangat penting dalam mendukung keputusan audit. Selain itu, auditor harus memiliki kemampuan dokumentasi, merekomendasikan tindakan korektif, serta berkomunikasi dan bernegosiasi.

#### **2.1.3.4 Manfaat Kompetensi Auditor Internal**

Menurut Jen Surya dan Ridwan Saleh (2020:20) manfaat kompetensi auditor internal, yaitu :

1. “Memastikan atau meyakinkan atas proses pengelolaan risiko
2. Meyakinkan bahwa risiko telah dievaluasi secara benar
3. Melakukan evaluasi proses manajemen risiko
4. Melakukan evaluasi laporan risiko utama
5. Melakukan review pengelolaan risiko utama.”

Menurut Dewi Indriasih (2020:30) manfaat kompetensi auditor internal, yaitu sebagai berikut :

1. “Informasi keuangan dan operasional yang akurat dan andal;
2. Segala bentuk kemungkinan (Resiko) di perusahaan atau lembaga sudah diminimalisir;
3. Berbagai peraturan, baik internal ataupun eksternal yang bisa diterima;
4. Pencapaian ciri-ciri operasional yang memuaskan;
5. Segala bentuk kekuatan organisasi telah digunakan secara efisien dan ekonomis;
6. Tujuan dari organisasi sudah dilakukan secara efektif. Semua punya tujuan untuk melakukan konsultasi manajemen serta membantu anggota lainnya untuk melaksanakan pekerjaannya secara efektif.”

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas, dapat diinterpretasikan bahwa manfaat kompetensi auditor internal memastikan pengelolaan risiko berjalan dengan baik, mengevaluasi proses manajemen risiko, serta meninjau risiko utama yang dihadapi organisasi. Selain itu, kompetensi ini membantu menjaga keakuratan informasi keuangan dan operasional, mengurangi risiko, serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan. Auditor yang kompeten juga berperan dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional serta mendukung pencapaian tujuan organisasi melalui konsultasi manajemen dan bimbingan kepada anggota lainnya.

## **2.1.4 Pemanfaatan Teknologi Digital**

### **2.1.4.1 Pengertian Pemanfaatan Teknologi Digital**

Menurut Sastya H.Wibowo et al. (2023:3) pengertian pemanfaatan teknologi digital adalah:

“Pemanfaatan teknologi digital merujuk pada penggunaan sistem berbasis digital seperti internet, komputasi awan, big data, kecerdasan buatan (AI), dan teknologi digital lainnya dalam berbagai aspek kehidupan manusia.”

Menurut Astri R Banjarnahor et al. (2022:106) pengertian pemanfaatan teknologi digital adalah :

“Pemanfaatan teknologi digital adalah alat yang tidak lagi bergantung pada tenaga kerja manual tetapi pada sistem operasi otomatis berdasarkan sistem komputerisasi atau format yang dapat dibaca *computer*.”

Menurut Hildawati (2024:35) pemanfaatan teknologi digital adalah :

“Pemanfaatan teknologi digital adalah mudahnya akses informasi yang diperlukan lebih cepat, inovasi di berbagai bidang yang bergantung pada

teknologi digital untuk memfasilitasi proses dalam pekerjaan, munculnya media massa digital, khususnya media elektronik, sebagai sumber pengetahuan dan informasi bagi masyarakat dan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang timbul dari pengembangan dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.”

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas, dapat diinterpretasikan bahwa pemanfaatan teknologi digital merujuk pada penggunaan sistem otomatis berbasis komputer untuk menggantikan tenaga manual, yang memungkinkan akses informasi lebih cepat, mendorong inovasi di berbagai bidang, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

#### **2.1.4.2 Jenis-jenis Teknologi Digital**

Menurut Sastya H. Wibowo et al. (2023:3) jenis-jenis teknologi yang digunakan beberapa bidang adalah sebagai berikut :

1. “Industri  
Teknologi digital juga telah membuka jalan untuk jenis industri baru, industri terdesentralisasi, di mana tidak semua operasi dapat dipisahkan dari apa yang disebut teknologi digital, seperti *Internet of Thing (IoT)*, komputasi awan (*Cloud Computing*), *Big data*, kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*), *augmented reality (AR)* & *virtual reality (VR)*, yang sudah menggunakan atau memanfaatkan teknologi digital dalam bidang industri tersebut.
2. Ekonomi  
Teknologi memainkan peran penting, misalnya dalam pengenalan metode pembayaran digital baru, seperti penggunaan dompet digital, di toko *online* yang tidak memerlukan pertemuan tatap muka.
3. Pendidikan  
Teknologi digital memfasilitasi akses cepat ke informasi baru dan hal-hal spesialis seperti pengajaran tatap muka dapat ditangani secara virtual, yaitu hanya dengan *videophone*, *teleconference* yang dapat digunakan untuk pembelajaran digital (*digital course*).

4. Sosial

Penggunaan teknologi digital telah merasuk ke ranah sosial. Banyak lingkungan teknologi digital telah digunakan untuk kebutuhan sosial secara umum, seperti media sosial facebook, whatsapp, instagram dan lain-lainnya.

5. Penelitian

Di bidang penelitian, ada mikroskop digital, teleskop, teropong, Mikroskop dapat ditampilkan di layar yang menunjukkan apa yang dilihat dengan mikroskop. Teknologi digital juga bermanfaat untuk penemuan baru yang dapat mempengaruhi kemajuan ilmu pengetahuan.

6. Bidang Fotografi dan Musik

Kamera digital diperkenalkan di bidang potret (*photography*) sebagai bagian dari teknologi digital. Kamera digital bahkan lebih diminati dari pada kamera yang digunakan generasi sebelum kamera digital. Kenyamanan yang ditawarkan membuat dunia fotografi semakin maju.”

Menurut David Pajung (2022:9) jenis-jenis teknologi digital yang adalah sebagai berikut :

“Beberapa jenis-jenis teknologi digital yang telah digunakan dalam perusahaan BUMN guna menunjang operasional dan tata kelola perusahaan, yaitu :

1. *Internet of Things (IoT)*

*Internet of Things* adalah teknologi yang memungkinkan segala hal dapat terkoneksi dengan internet. *IoT* dapat memungkinkan objek tertentu tanpa tenaga manusia dapat mentransfer data lewat jaringan dari objek ke objek tertentu dalam waktu kapanpun.

2. *Big Data*

Dengan memanfaatkan *tool business intelligence* pada *big data* , manajemen perusahaan dapat melakukan evaluasi menggunakan data keuangan perusahaan misalnya pendapatan perusahaan serta nilai transaksi dengan *customer*, juga melalui *big data* perusahaan dapat menentukan bisnis model dan lebih pas Sertal dapat meningkatkan pendapatan perusahaan dengan cara memfokuskan produk dan *services* perusahaan yang memiliki potensi keuntungan yang paling tinggi.

3. *Cloud Computing* (komputansi awan)

Komputasi awan (*cloud computing*) merupakan teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat pengelolaan data dan aplikasi, di mana pengguna komputer diberikan hak akses (*login*). Dalam komputasi awan terdapat tiga model pengiriman data : pertama, adalah *Software as a Service (SaaS)*, kedua *Platform as a Service (PaaS)*, ketiga adalah *Infrastructure as a Service (IaaS)*. *SaaS* dikelola oleh penyedia layanan platform dan infrastruktur yang

menjalankan aplikasi tersebut. PaaS merupakan layanan menggunakan platform yang telah disediakan, pengembang fokus pada aplikasi yang dibuat tanpa memikirkan tentang pemeliharaan platform. IaaS adalah layanan untuk penggunaan infrastruktur digital yang telah tersedia..

4. *Artificial Intelligence (AI)*

*Artificial Intelligence* adalah tambahan perangkat sistem yang pada sebuah sistem yang telah ada yang merupakan kecerdasan buatan yang dapat digunakan sesuai target dan kebutuhan perusahaan. Teknologi ini mempunyai kecerdasan manusia seperti kemampuan mengembangkan data dan kemampuan menganalisis.

5. *Teknologi Robotik*

*Teknologi robotik* memudahkan dalam pekerjaan yang selama ini dilakukan oleh tenaga manusia karena mempunyai kemampuan meningkatkan kualitas dan kuantitas dalam produksi, serta mempermudah pekerjaan sehingga teknologi *robotic* dapat menciptakan efisiensi dan efektifitas dan dapat menggantikan peran tenaga manusia.

6. *Blockchain*

Teknologi *blockchain* merupakan sistem penyimpanan data secara digital lalu menghubungkan blok-blok data tersebut untuk digunakan dalam transaksi. Teknologi ini dapat berjalan sendiri menggunakan algoritma *computer* tanpa membuluhkan *Msistem* tertentu yang mengaturnya. *Blockchain* telah digunakan dalam *cryptocurrency* serta bidang keuangan.”

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas, dapat diinterpretasikan bahwa jenis-jenis teknologi digital kini digunakan di banyak sektor, mulai dari *Internet of Things (IoT)*, *big data*, komputasi awan, kecerdasan buatan (*AI*), teknologi *robotik*, hingga *blockchain*. Pemanfaatan teknologi ini terlihat dalam bidang industri, ekonomi, pendidikan, sosial, riset, hingga seni seperti fotografi dan musik. Di lingkungan perusahaan, khususnya BUMN, penerapan teknologi tersebut membantu kelancaran operasional, memperbaiki sistem pengelolaan, mendorong efisiensi, serta mendukung pengambilan keputusan yang berbasis informasi dan data secara lebih cepat dan akurat.

### 2.1.4.3 Manfaat Teknologi Digital

Menurut Hildawati et al., (2024:28) manfaat teknologi digital bagi perusahaan, yaitu :

1. “Peningkatan Efisiensi dan Produktivitas melalui Teknologi Digital  
Peluang lain yang signifikan dari teknologi digital adalah peningkatan efisiensi dan produktivitas di berbagai sektor. Pemanfaatan teknologi digital seperti sistem manajemen rantai pasokan berbasis AI dan analisis data real-time dapat mengoptimalkan proses bisnis. Perusahaan yang mengadopsi teknologi digital secara menyeluruh dapat mencapai peningkatan produktivitas hingga 25%
2. Penerapan teknologi digital (AI) dalam Operasi Bisnis  
Salah satu peluang paling menjanjikan dari penerapan teknologi digital adalah penerapan kecerdasan buatan dalam konteks operasi bisnis. AI memungkinkan analisis big data secara cepat serta menyajikan pemahaman yang akurat bagi pengambilan keputusan. Implementasi AI tidak hanya memungkinkan otomatisasi proses bisnis tetapi juga memfasilitasi pengembangan solusi cerdas yang dapat meningkatkan kinerja operasional. Aplikasi AI dalam bisnis mampu meningkatkan efisiensi operasional sekaligus membuka peluang baru dalam penemuan pola bisnis yang lebih efektif.”

Menurut Gandasari et al. (2020) dalam Astri R Banjarnahor (2022:133) ada 4 manfaat teknologi digital, yaitu :

- 1) “Ekonomi. Rantai distribusi barang-barang manufaktur yang awalnya panjang menjadi terputus, membuat perusahaan mulai menjangkau pengguna akhir. Hal ini menguntungkan perusahaan dalam menekan biaya dan waktu distribusi dan juga menguntungkan pengguna akhir dengan memperoleh produk dengan harga lebih murah dan lebih cepat. Di bidang pertanian, penerapan teknologi termasuk alat mesin pertanian (alsintan) dapat meningkatkan produktivitas hasil pertanian. Setiap orang tetap bekerja dengan peralatan digital di mana saja dan kapan saja sambil menghasilkan banyak uang.
- 2) Efisiensi dan efektivitas. Pemasaran digital membuat perusahaan manufaktur di sekitar dunia mampu menjangkau pasar global dengan mudah, efisien, dan efektif.
- 3) Energi terbarukan, inovasi dan teknologi. Contoh adalah terbarukan untuk listrik, gedung dan transportasi; kendaraan elektrik; dan transaksi *online*. Di Indonesia beberapa realisasi sudah terlihat, salah satunya sinergi BUMN

menghadirkan platform *e-money* terintegrasi LinkAja. Di berbagai negara, kendaraan listrik yang sudah mulai didorong inovasinya oleh pemerintah dan akademisi. Adanya inovasi kecerdasan buatan (*AI*), robot canggih, *internet of things (IoT)*, *3D Printing*, dan *Augmented Reality/Virtual Reality (AR/VR)*.

- 4) Pekerjaan. Semuanya digantikan oleh mesin yang terhubung dan berkomunikasi satu sama lainnya dan membuat banyak pekerjaan tidak lagi membutuhkan tenaga dan otak manusia.”

Menurut David Pajung (2022:12) manfaat teknologi bagi perusahaan, yaitu :

1. “Efisiensi biaya dan menurunkan cost perusahaan  
Aktivitas pada perusahaan yang memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi, perlu menerapkan digitalisasi dalam operasional perusahaan, dan melalui penggunaan dan memaksimalkan proses digitalisasi ini, operasional dapat memangkas waktu dan biaya pengembangan produk hingga 50%.
2. Meningkatkan value dan daya saing produk  
Penggunaan digitalisasi perusahaan secara signifikan dapat memberikan pengaruh terhadap peningkatan kecepatan dalam memperkaya spesifikasi produk. Produk dapat dikontrol dan didesain untuk memiliki nilai dan daya saing yang tinggi. Sehingga perusahaan punya waktu luang lebih banyak untuk menciptakan strategi dan inovasi-inovasi baru.
3. Memberikan kemudahan  
Pelayanan kepada pelanggan lebih efektif dan mempermudah para karyawan dalam menjalankan tanggungjawab. Dengan adanya penerapan sistem diharapkan akan mempersingkat proses semua proses dalam tata kelola perusahaan.
4. Meningkatkan akurasi data dan jangkauan global  
Dengan penerapan sistem digitalisasi, dapat membuat sumber data yang lebih akurat yang diperlukan manajer dan pimpinan dalam mengambil keputusan yang strategis. Melalui digitalisasi data dapat diakses dimana saja. Tidak dibatasi ruang dan waktu.
5. Jarak dan wilayah bukan menjadi kendala lagi  
Digitalisasi mengatasi permasalahan seperti jarak dan wilayah serta waktu. Digitalisasi juga dapat mendorong otomatisasi yang antara lain mampu meningkatkan waktu efisiensi pelayanan kepada pelanggan. Kegunaan lain adalah dapat menghemat waktu dalam pencarian data dan menemukan dokumen yang diperlukan.
6. Lebih teratur dan sistematis  
Digitalisasi dapat mengupayakan semua data yang di input untuk disortir dan ditampilkan sesuai dengan keinginan. Proses digitalisasi secara langsung tentunya dapat membuat pekerjaan dan penyimpanan data menjadi lebih teratur dan sistematis dan sangat mudah dalam pencarian data yang dibutuhkan.

7. Mempermudah komunikasi antar karyawan

Dalam pengelolaan perusahaan, faktor komunikasi menjadi hal yang sentral dan penting. Komunikasi bukan hanya menjadi satu jenis saja, tapi bisa digabungkan dengan multifungsi, sesuai kebutuhan, Peningkatan kualitas dalam berkomunikasi ini juga pastinya diperlukan baik untuk internal maupun eksternal perusahaan. Melalui penerapan *Human Resources Management (HRM)* sangat membantu pengelolaan SDM dalam sebuah perusahaan khususnya terkait monitoring prestasi dan target kerja setiap karyawan. Kemudahan digitalisasi juga sangat membantu proses evaluasi dalam pemberian *reward* kepada pegawai berprestasi.”

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas, dapat diinterpretasikan bahwa manfaat teknologi digital dalam ekonomi, perusahaan dapat memangkas rantai distribusi, menghemat biaya, dan meningkatkan pemasaran secara global. Inovasi seperti energi terbarukan, kecerdasan buatan, dan *Internet of Things (IoT)* mendorong perkembangan industri, termasuk kendaraan listrik dan transaksi *online*. Digitalisasi juga membantu perusahaan menekan biaya operasional, meningkatkan daya saing produk, serta mempermudah layanan dan komunikasi.

#### **2.1.4.4 Tantangan Pemanfaatan Teknologi Digital**

Menurut Sastya Hendri Wibowo et al. (2023:7) tantangan pemanfaatan teknologi adalah sebagai berikut :

1. “Kesalahan yang dapat terjadi saat mengubah sinyal analog ke digital (digitalisasi)
2. Peretas atau virus dapat mencuri informasi digital
3. Menciptakan ketergantungan yang berlebihan pada pengguna, yang dapat secara serius memengaruhi keterampilan empati dan interaksi sosial mereka.”

Menurut Hildawati et al., (2024:181) tantangan pemanfaatan teknologi digital adalah sebagai berikut :

1. “Keamanan dan Privasi Data
  - a. Ancaman keamanan *cyber* yang semakin kompleks dan serius. Ancaman seperti serangan *malware*, *ransomware*, dan serangan siber lainnya dapat mengancam integritas data dan operasional suatu entitas.
  - b. Isu privasi dalam penggunaan teknologi digital seringkali melibatkan pengumpulan data pribadi secara besar-besaran. Isu privasi menjadi perhatian utama di mana organisasi sering kali harus menemukan keseimbangan antara pemanfaatan data untuk inovasi dan perlindungan privasi individu. Isu-isu etika seputar penggunaan data pribadi menjadi semakin kompleks sehingga menuntut perhatian khusus dari berbagai pemangku kepentingan.
2. Ketidaksetaraan Akses dan Penggunaan
 

Dalam konteks era globalisasi yang dipercepat oleh kemajuan teknologi digital ketidaksetaraan akses dan pemanfaatan teknologi menonjol sebagai tantangan krusial yang menuntut perhatian serius. Tantangan ini tidak hanya mencakup kesenjangan dalam akses fisik terhadap perangkat dan infrastruktur digital, tetapi juga melibatkan kesenjangan dalam pemahaman, keterampilan, dan pemanfaatan teknologi tersebut. Oleh karena itu untuk meraih manfaat penuh dari globalisasi digital upaya intensif diperlukan untuk mengatasi ketidaksetaraan tersebut melalui program-program pendidikan dan akses yang inklusif. Dengan demikian masyarakat dapat bersama-sama mengambil bagian dalam perubahan positif dan mengejar pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

  - a. *Digital divide* di berbagai lapisan masyarakat: *Digital divide* merujuk pada kesenjangan yang terjadi antara individu atau kelompok yang mempunyai akses penuh serta efektif terhadap teknologi digital, dan kelompok yang tidak mempunyai akses atau memiliki akses yang terbatas. Kesenjangan ini dapat dipengaruhi oleh faktor geografis, ekonomi, dan pendidikan. Di beberapa wilayah infrastruktur teknologi mungkin tidak cukup baik, membatasi akses masyarakat terhadap perkembangan digital. Dampak ketidaksetaraan digital terlihat pula di kalangan anak-anak dan remaja. Anak-anak dan remaja yang tidak mempunyai akses yang mencukupi ke teknologi digital bisa jadi mengalami masalah dalam mendapatkan akses sumber daya pendidikan *online* sehingga meningkatkan risiko kesenjangan pendidikan.
  - b. Tantangan aksesibilitas dan inklusivitas: Tantangan selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah masalah aksesibilitas dan inklusivitas dalam penggunaan teknologi digital. Desain produk dan layanan digital seringkali tidak memperhitungkan kebutuhan kelompok difabel sehingga

menciptakan hambatan dalam aksesibilitas. Hal ini dapat membatasi partisipasi kelompok difabel dalam kehidupan *online* dan peluang ekonomi digital. Lebih lanjut ketidaksetaraan aksesibilitas juga dapat mendorong kesenjangan sosial dan mengisolasi kelompok tertentu dari manfaat yang ditawarkan oleh teknologi digital. Oleh karenanya harus diperhatikan secara spesifik desain yang memperhitungkan keberagaman pengguna untuk menciptakan lingkungan digital yang lebih inklusif.

### 3. Perubahan Ekosistem Kerja

- a. Pengaruh teknologi digital terhadap pekerjaan: Tantangan utama yang dihadapi dalam perubahan ekosistem kerja adalah dampak teknologi digital terhadap pekerjaan. Implementasi teknologi seperti kecerdasan buatan (*AI*) serta otomatisasi sudah merombak lanskap pekerjaan dengan cepat. Perubahan ini dapat menyebabkan pergeseran signifikan dalam jenis pekerjaan yang dibutuhkan di berbagai sektor.
- b. Adaptasi dan kesiapan tenaga kerja terhadap perubahan: Perubahan dalam tuntutan pekerjaan memerlukan adaptasi yang cepat dari tenaga kerja. Kurangnya kesiapan tenaga kerja untuk mengadopsi keterampilan baru dapat mengakibatkan ketidaksetaraan dalam akses pekerjaan dan meningkatkan disparitas sosial ekonomi.”

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas, dapat diinterpretasikan bahwa tantangan pemanfaatan teknologi digital seperti kesalahan digitalisasi, risiko peretasan, dan ketergantungan yang memengaruhi keterampilan pengguna. Keamanan data menjadi perhatian utama karena meningkatnya ancaman siber dan dilema etika dalam pengumpulan data pribadi. Ketimpangan akses teknologi, dipengaruhi faktor infrastruktur, ekonomi, dan pendidikan, menyebabkan kesenjangan dalam pemanfaatannya, termasuk di pendidikan dan ekonomi. Kurangnya aksesibilitas bagi penyandang disabilitas memperburuk ketidaksetaraan. Di dunia kerja, otomatisasi dan kecerdasan buatan mengubah kebutuhan tenaga kerja, sehingga diperlukan adaptasi cepat untuk menghindari kesenjangan keterampilan dan ekonomi.

### 2.1.4.5 Kendala Pemanfaatan Teknologi Digital

Menurut Budi Harto et al. (2023:85) kendala pemanfaatan teknologi digital adalah sebagai berikut :

1. “Aspek Teknis
  - 1) Kompleksitas teknologi implementasi teknologi baru dan integrasi sistem yang kompleks dapat menjadi tantangan teknis yang membutuhkan pemahaman mendalam dan keahlian teknis.
  - 2) Ketersediaan sumber daya tantangan dalam memperoleh sumber daya yang cukup, seperti infrastruktur yang memadai, perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan, serta kebutuhan untuk pelatihan karyawan dalam teknologi yang baru.
  - 3) Keterbatasan integrasi kesulitan dalam mengintegrasikan sistem dan aplikasi yang berbeda secara mulus, terutama jika infrastruktur teknologi yang ada tidak dirancang dengan kemampuan integrasi yang baik.
2. Faktor Organisasi dan Manajemen
  - 1) Resistensi terhadap perubahan karyawan dan pemangku kepentingan dalam organisasi mungkin mengalami resistensi terhadap perubahan yang disebabkan oleh integrasi teknologi dan perubahan proses bisnis.
  - 2) Kurangnya komitmen manajemen kurangnya dukungan dan komitmen dari manajemen senior dalam melaksanakan transformasi bisnis dapat menghambat keberhasilan integrasi teknologi dan proses bisnis.
  - 3) Ketidaksiharian budaya organisasi budaya organisasi yang konservatif dan kurang inovatif dapat menjadi hambatan dalam mengadopsi dan mengintegrasikan teknologi baru secara efektif.
3. Keamanan dan *Privasi* Data
  - 1) Ancaman keamanan siber risiko keamanan data, seperti serangan siber dan pelanggaran data, dapat menghambat integrasi teknologi dan proses bisnis jika langkah-langkah keamanan yang memadai tidak diimplementasikan.
  - 2) Kepatuhan regulasi ketentuan hukum dan regulasi terkait privasi data dan keamanan informasi dapat membatasi dan mengatur cara organisasi dapat mengintegrasikan teknologi dan proses bisnis.
4. Pengelolaan Perubahan dan Perubahan Budaya
  - 1) Kurangnya perencanaan dan pengelolaan perubahan ketidakmampuan dalam merencanakan dan mengelola perubahan dapat menyebabkan resistensi, kebingungan, dan ketidakpastian dalam integrasi teknologi dan proses bisnis.
  - 2) Perubahan budaya mengubah budaya organisasi untuk mendukung adopsi teknologi dan transformasi bisnis dapat menjadi tantangan, terutama jika ada kekakuan budaya dan ketidakpercayaan terhadap perubahan yang dibawa oleh teknologi baru.”

Menurut David Pajung (2022:42) kendala pemanfaatan teknologi digital adalah sebagai berikut :

“Penerapan pemanfaatan teknologi digital dalam melaksanakan GCG pada BUMN, terdapat kendala yang meliputi masalah internal, eksternal dan struktur kepemilikan, yaitu :

- 1) Masalah internal
  - a) Belum adanya peta jalan (*road map*) dari sebagian besar perusahaan BUMN terhadap perencanaan sistem digital dalam seluruh proses manajemen perusahaan khususnya dalam implementasi GCG.
  - b) Belum meratanya kesadaran dan komitmen baik dari pimpinan manajemen maupun seluruh karyawan untuk menjadikan teknologi digital sebagai alat dalam peningkatan kinerja dan performa perusahaan.
  - c) Terbatasnya kompetensi SDM yang ada dalam entitas perusahaan yang mampu menciptakan inovasi dan pemanfaatan digitalisasi sebagai sistem dan perangkat kerja kelembagaan perusahaan khususnya dalam penerapan GCG.
  - d) Masih seringnya terjadi konflik kepentingan beberapa pemangku kepentingan dan pengambil kebijakan dalam perusahaan (integritas).
  - e) Masih rendahnya budaya perusahaan untuk mengimplementasikan GCG yang berbasis digital.
  - f) Sistem pengendalian internal yang belum efektif.
- 2) Masalah eksternal :
  - a) Belum tegasnya pemegang otoritas antara lain Bapepam, Bank Indonesia, BPPN dan kementerian BUMN, kementerian Keuangan dan Kementerian terkait lainnya terhadap pelanggaran yang menyebabkan kinerja dan performa perusahaan yang cenderung (merugi).
  - b) Masih lemahnya penerapan sanksi hukum terhadap kinerja manajemen yang buruk dan merugikan perusahaan.
  - c) Belum adanya payung hukum untuk proteksi keamanan kejahatan pencurian data yang merugikan perusahaan (*security cyber crime*)
- 3) Masalah struktur kepemilikan saham
 

Adalah masalah yang diakibatkan dari kepemilikan dalam saham (persentase), kepemilikan saham perusahaan terdiri atas dua yaitu: Pertama, kepemilikan terkonsentrasi (pemilik saham mayoritas) dalam hal ini adalah pemerintah selaku pemilik saham mayoritas dalam BUMN, dan kedua adalah kepemilikan menyebar (saham tersebar pada banyak orang dengan kepemilikan yang kecil-kecil (berlaku pada perusahaan non BUMN).”

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas, dapat diinterpretasikan bahwa pemanfaatan teknologi digital menghadapi berbagai kendala, mulai dari aspek

teknis seperti sistem yang rumit, kurangnya infrastruktur, serta terbatasnya tenaga ahli dan pelatihan. Di tingkat organisasi, hambatan muncul karena penolakan terhadap perubahan, rendahnya dukungan manajemen, dan budaya kerja yang belum terbuka pada digitalisasi. Masalah keamanan data juga menjadi tantangan, terutama terkait ancaman siber dan aturan privasi. Kurangnya perencanaan dan pengelolaan perubahan memperburuk situasi, ditambah faktor eksternal seperti lemahnya pengawasan, belum jelasnya otoritas, dan kurangnya perlindungan hukum terhadap kejahatan digital. Struktur kepemilikan yang tidak seimbang juga bisa menimbulkan konflik kepentingan, sehingga menghambat penerapan teknologi secara menyeluruh.

## **2.1.5 Efektivitas Pencegahan Kecurangan**

### **2.1.5.1 Pengertian Kecurangan**

Menurut *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)* (2021) dalam Eko Sudarmanto et al. (2021:145) pengertian kecurangan adalah :

“*Fraud* atau kecurangan adalah penyajian yang salah tentang kebenaran atau menyembunyikan fakta material yang mendorong seseorang bertindak menimbulkan kerugian bagi orang lain. *Fraud* juga mencakup tindakan yang dilakukan secara sengaja untuk mengambil harta atau uang orang lain dengan tipu muslihat, penipuan, atau cara-cara yang tidak adil lainnya.”

Menurut Amin Widjaja Tunggal (2016:31) pengertian kecurangan adalah :

“Kecurangan merupakan suatu istilah yang umum, dan mencakup segala macam cara yang dapat digunakan dengan kelihatan tertentu, yang dipilih oleh seorang individu, untuk mendapatkan keuntungan dari pihak lain dengan melakukan representasi yang salah. Tidak ada aturan yang baku dan tetap yang bisa dikeluarkan sebagai proposisi umum dalam mendefinisikan kecurangan, termasuk kejutan, tipu muslihat, ataupun cara-cara yang licik dan

tidak wajar yang digunakan untuk melakukan penipuan. Batasan satu-satunya dalam mendefinisikan kecurangan adalah hal-hal yang membatasi ketidakjujuran manusia.”

Menurut Suhardi (2022:1) pengertian kecurangan adalah :

“Kecurangan adalah tindakan sengaja untuk menyembunyikan fakta dengan tujuan memperoleh keuntungan atau untuk menghindari jeratan hukum, yang mengakibatkan kerusakan atau kerugian pada suatu organisasi atau orang.”

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas, dapat diinterpretasikan bahwa kecurangan adalah tindakan sengaja untuk memperoleh keuntungan dengan cara tidak jujur, seperti manipulasi informasi, penyembunyian fakta, atau tipu muslihat. Hal ini mencakup berbagai cara licik yang merugikan pihak lain demi keuntungan pribadi tanpa aturan baku dalam mendefinisikannya. *Fraud* melibatkan manipulasi informasi atau penyembunyian fakta yang dapat merugikan orang lain, termasuk penipuan dan tipu daya.

### **2.1.5.2 Penyebab Terjadinya Kecurangan**

Menurut Amin Widjaja Tunggal (2016:21) penyebab terjadinya kecurangan dalam organisasi adalah :

1. “Kurangya pengendalian yang mencegah atau mendeteksi perilaku kecurangan.
2. Ketidakmampuan untuk menilai kualitas kinerja.
3. Kegagalan untuk memberikan sanksi tegas terhadap perilaku kecurangan.
4. Kurangnya akses terhadap informasi.
5. Pengabaian, sikap apatis, dan tidak adanya kapasitas yang sesuai.
6. Kurangnya upaya melakukan jejak audit.”

### 2.1.5.3 Jenis-jenis Kecurangan

Menurut Eko Sudarmanto (2021:147) jenis-jenis kecurangan adalah :

1. “Rekayasa Laporan  
Keuangan Rekayasa laporan keuangan merupakan salah satu bentuk *fraud* yang paling sering terjadi dan merupakan pelanggaran berat terhadap prinsip-prinsip GCG, terutama transparansi dan akuntabilitas. Rekayasa laporan keuangan merupakan penyampaian informasi keuangan yang salah dan tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi sebenarnya. Rekayasa laporan keuangan yang sering terjadi berupa manipulasi jumlah laba dengan tujuan untuk mempercantik laporan keuangan agar kinerja keuangan perusahaan terlihat baik dan menarik bagi investor. Hal ini disebut juga dengan *window dressing*.
2. Pembocoran Informasi  
Bentuk *fraud* lainnya yang berkaitan dengan asimetri informasi adalah pembocoran informasi. Pembocoran informasi adalah penyampaian informasi kepada pihak-pihak tertentu yang seharusnya tidak dilakukan atau belum saatnya untuk diumumkan. Dalam pasar modal, *fraud* berupa pembocoran informasi dikenal dengan istilah *insider trading* atau perdagangan orang dalam. *Insider trading* biasanya dilakukan dengan pembocoran informasi mengenai rencana-rencana *corporate action* yang belum saatnya diumumkan kepada publik, antara lain rencana merger, akuisisi, pembagian *dividen*, *stock split*, *reverse stock split*, *buyback*, dan aksi-aksi korporasi lainnya.
3. Korupsi  
Korupsi juga merupakan bentuk *fraud* yang paling banyak terjadi dalam dunia bisnis dan pemerintahan. Korupsi adalah tindakan penggelapan uang atau barang milik perusahaan, negara, organisasi, atau pihak-pihak lainnya yang digunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Dengan kata lain, korupsi adalah tindakan mengambil segala sesuatu yang bukan haknya.
4. Mengurangi Timbangan atau Takaran Produk  
Bentuk *fraud* lainnya dalam kegiatan bisnis adalah melakukan pengurangan timbangan atau takaran produk dari jumlah yang seharusnya. Tujuannya adalah untuk memperoleh keuntungan dari selisih nilai timbangan atau takaran produk yang dijual tersebut.
5. Wanprestasi (*false promises*)  
Wanprestasi sering disebut sebagai *false promises* atau kegagalan dalam pemenuhan janji juga merupakan salah satu bentuk *fraud* yang sering terjadi dalam bisnis. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap prinsip GCG, yaitu *accountability* dan *responsibility* karena menunjukkan sikap yang tidak bertanggung jawab atas kewajiban yang harus dipenuhinya.”

#### 2.1.5.4 Pencegahan Kecurangan

Menurut Amin Widjaja Tunggal (2016:32) pencegahan kecurangan adalah :

“Pencegahan kecurangan merupakan cara yang paling efektif untuk mengurangi kerugian akibat kecurangan. Setelah kecurangan dilakukan, tidak ada pemenang. Pelaku merugi karena mereka biasanya merupakan pelaku yang baru pertama kali melakukan kecurangan yang akan merasa terhina dan malu apalagi ketika akan menerima konsekuensi hukum. Mereka biasanya harus membayar pajak dan juga ganti rugi, dan sering kali ada sanksi secara finansial dan konsekuensi lainnya.”

Menurut Suhardi (2022:76) pencegahan kecurangan adalah:

“Pencegahan kecurangan adalah aktivitas yang dilaksanakan manajemen dalam hal penetapan kebijakan, sistem dan prosedur yang membantu meyakinkan bahwa tindakan yang diperlukan sudah dilakukan dewan komisaris, manajemen, dan personil lain perusahaan untuk dapat memberikan keyakinan memadai.”

Menurut Bambang Arianto (2023:37) pencegahan kecurangan adalah :

“Pencegahan kecurangan atau *fraud* merupakan cara yang paling hemat biaya untuk mengurangi kerugian akibat *fraud*. Setelah *fraud* dilakukan, tidak ada pemenang. Pelaku kalah karena biasanya pelaku pertama kali mengalami penghinaan, rasa malu, dan konsekuensi hukum.”

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas, dapat diinterpretasikan bahwa pencegahan kecurangan merupakan langkah efektif dan efisien untuk mengurangi risiko kerugian. Upaya ini dilakukan melalui penetapan kebijakan, sistem, dan prosedur oleh manajemen agar pelaporan keuangan andal, operasional berjalan efisien, serta perusahaan taat pada hukum. Pencegahan juga lebih menguntungkan dibanding menangani kecurangan setelah terjadi, karena pelaku sering menghadapi rasa malu, sanksi hukum, dan kerugian finansial.

### 2.1.5.5 Upaya Pencegahan Kecurangan

Menurut Dewi Indriasih (2020:91) dalam melakukan pencegahan kecurangan terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan, yaitu:

1. “Punya sistem kendali yang standar baik Terkait pengendalian internal, *Committee of Sponsoring Organisations (COSO)* mewajibkan setiap lembaga atau perusahaan mempunyai kerangka pengendalian internal sebagai berikut:
  - a) Ciptakan lingkungan yang baik sehingga bisa ikut mengendalikan.
  - b) Memahami setiap resiko
  - c) Praktek pencegahan yang baik
  - d) Adanya komunikasi dan informasi yang baik
  - e) Melakukan pengawasan dengan benar

Di antara lima elemen yang disebutkan dalam kerangka di atas, berfokus pada:

  - a. Lingkungan pengendalian, Ini adalah lingkungan kerja yang dibuat atau dibentuk oleh perusahaan untuk karyawan. Elemen-elemen lingkungan pengendalian meliputi:
    - 1) Manajemen memberi contoh dan berperan aktif dalam pencegahan;
    - 2) Membangun komunikasi yang baik dalam manajemen;
    - 3) Merekrut orang sesuai standar;
    - 4) Bersihkan struktur organisasi;
    - 5) Audit interna efektif.
  - b. Arus komunikasi dan informasi yang baik (sistem akuntansi)
 

Setiap penipuan yang terjadi pasti termasuk penipuan, menyembunyian penipuan, dan konversi. Oleh karena itu, sistem akuntansi yang baik dan benar dapat memberikan jejak audit untuk membantu mendeteksi kecurangan dan membuatnya sulit untuk disembunyikan. Sistem akuntansi yang baik harus memastikan bahwa transaksi yang dicatat mencakup standar berikut:

    - 1) Keabsahan;
    - 2) Dilakukan otorisasi dengan benar;
    - 3) Komplit;
    - 4) Diklasifikasikan dengan benar;
    - 5) Dibuat laporan dengan periode yang benar;
    - 6) Dinilai dengan benar;
    - 7) Diikhtisarkan dengan benar.
  - c. Aktivitas atau prosedur pengendalian Untuk mencocokkan karakter karyawan dengan pemilik usaha untuk menjadikan perusahaan dapat mewujudkan targetnya, tentunya diperlukan 5 prosedur utama:
    - 1) Dipisahkan antara tugas dan pengawasan;
    - 2) Sistem otorisasi;

- 3) Pemeriksaan bersifat independen;
  - 4) Pengamanan fisik;
  - 5) Dokumen dan pencatatan.
2. Mencegah adanya kolusi.
  3. Karyawan diawasi dan diberikan jalur pelaporan yang mudah untuk melaporkan *Fraud*.
  4. Disosialisasikan tentang ancaman hukum yang diterima oleh pelaku *Fraud*.
  5. Melaksanakan audit secara proaktif.”

Sedangkan menurut Eko Sudarmanto (2021:215) upaya pencegahan kecurangan dapat dilakukan sebagai berikut :

1. “Menciptakan dan mengembalikan budaya menghargai kejujuran dan nilai etika yang tinggi.
  - a. Menciptakan dan mengembalikan budaya menghargai kejujuran dan nilai etika yang tinggi. Dalam hal ini hendaknya mencakup hal-hal sebagai berikut:
  - b. Menumbuhkan budaya menghargai kejujuran
  - c. Menumbuhkan nilai-nilai etika yang tinggi
  - d. Menjelaskan perilaku yang diharapkan
  - e. Menciptakan setting tone the at the top
  - f. Merekrut dan mempromosikan karyawan yang tepat
2. Penerapan dan evaluasi proses pengendalian *anti fraud*.  
Kecurangan tidak akan terjadi tanpa persepsi adanya kesempatan dan menyembunyikan perbuatannya organisasi hendaknya proaktif mengurangi kesempatan dengan:
  - a. Mengidentifikasi dan mengukur risiko *fraud* yang akan terjadi
  - b. Menurunkan risiko *fraud*
  - c. Implementasi dan monitoring sistem pengendalian internal dengan baik
3. Pengembangan proses pengawasan (*Oversight Process*).  
Dalam hal ini pihak pengawasan hendaknya melakukan:
  - a. Mampu mencegah dan menangkal kecurangan secara efektif
  - b. Memiliki fungsi pengawasan yang tepat
  - c. Pengawasan dilaksanakan oleh pihak-pihak yang tepat sesuai fungsinya.”

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas, dapat diinterpretasikan bahwa upaya pencegahan kecurangan dilakukan dengan memperkuat pengendalian internal, membangun budaya jujur, dan memastikan pengawasan berjalan efektif. Ini mencakup penciptaan lingkungan kerja yang baik, sistem pencatatan yang rapi,

pembagian tugas yang jelas, serta dokumentasi yang tertib. Penting juga menyediakan jalur pelaporan yang aman, mengedukasi soal sanksi hukum, dan menanamkan nilai etika dalam setiap proses kerja. Risiko kecurangan bisa ditekan lewat seleksi karyawan yang tepat dan pemantauan sistematis atas peluang penyimpangan.

### 2.1.5.6 Tujuan Pencegahan Kecurangan

Menurut Suhardi et al. (2022:76) tujuan pencegahan kecurangan adalah :

1. “Keandalan laporan keuangan
2. Efektivitas dan efisiensi operasi dan;
3. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.”

Menurut Amin Widjaja Tunggal (2016:33) tujuan pencegahan kecurangan adalah sebagai berikut :

1. “Menciptakan iklim budaya jujur, keterbukaan, dan saling membantu  
Riset menunjukkan bahwa cara paling efektif untuk mencegah *fraud* adalah mengimplementasikan program serta pengendalian *anti-fraud*, yang didasarkan pada nilai-nilai yang dianut perusahaan. Nilai-nilai semacam itu menciptakan lingkungan yang mendukung perilaku dan ekpektasi yang dapat diterima, bahwa pegawai dapat menggunakan nilai itu untuk mengarahkan tindakan mereka. Nilai-nilai itu membantu menciptakan budaya jujur, keterbukaan, dan saling membantu antar sesama anggota organisasi atau perusahaan. Keterbukaan antar anggota organisasi merupakan hal yang sangat pokok yang harus dimiliki setiap perusahaan dan berguna untuk perkembangan serta perilaku sumber daya manusia yang kompeten dan manajemen profesi yang efektif. Di samping adanya kejujuran dan keterbukaan, keberhasilan perusahaan dalam mencegah kecurangan tidak hanya ditentukan oleh hasil kerja individu, melainkan atas keberhasilan tim (kerja sama). Suatu organisasi dibentuk sebagai alat untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dan disepakati bersama oleh sekelompok orang yang membentuk atau menjadi anggota dalam organisasi, dan berfungsi sebagai makhluk sosial dan sekaligus sebagai makhluk individu. Sebagai makhluk sosial, orang-orang tersebut terkait dalam lingkungan masyarakat dan berarti mereka saling berhubungan, saling mempengaruhi dan saling membantu sesuai dengan kemampuan yang ada pada dirinya.

2. Proses rekrutmen yang jujur

Dalam upaya membangun lingkungan pengendalian yang positif, penerimaan pegawai merupakan awal dari masuknya orang-orang yang terpilih melalui seleksi yang ketat dan efektif untuk mengurangi kemungkinan memperkerjakan dan mempromosikan orang-orang yang tingkat kejujurannya rendah. Hanya orang-orang yang dapat memenuhi syarat tertentu yang dapat diterima. Kebijakan semacam itu mungkin mencakup pengecekan latar belakang orang-orang yang dipertimbangkan akan dipekerjakan atau dipromosikan menduduki jabatan yang bertanggung jawab. Pengecekan latar belakang, verifikasi pendidikan, riwayat pekerjaan, serta referensi pribadi calon karyawan, termasuk referensi tentang karakter dan integritas. Pelatihan secara rutin untuk seluruh pegawai mengenai nilai-nilai perusahaan dan aturan perilaku, dalam review kinerja regular termasuk diantaranya evaluasi kontribusi pegawai/individu dalam mengembangkan lingkungan kerja yang positif sesuai dengan nilai-nilai perusahaan, selalu melakukan evaluasi obyektif atas kepatuhan terhadap nilai-nilai perusahaan dan standar perilaku, dan setiap pelanggaran ditangani segera.

3. Pelatihan kesadaran akan penipuan (*fraud awareness*)

Semua pegawai harus dilatih tentang ekspektasi perusahaan menyangkut perilaku etis pegawai. Pegawai harus diberi tahu tentang tugasnya untuk menyampaikan *fraud* aktual atau yang dicurigai serta cara yang tepat untuk menyampaikannya. Selain itu pelatihan kewaspadaan terhadap kecurangan juga harus disesuaikan dengan tanggung jawab pekerjaan khusus pegawai itu.

4. Lingkup kerja yang *positif*

Dari beberapa riset yang telah dilakukan terlihat bahwa pelanggaran lebih jarang terjadi bila karyawan mempunyai perasaan positif tentang atasan mereka ketimbang bila mereka merasa diperalat, diancam atau diabaikan. Pengakuan dan sistem penghargaan (*reward*) sesuai dengan sasaran dan hasil kinerja, kesempatan yang sama bagi semua pegawai, program kompensasi secara profesional, pelatihan secara profesional dan prioritas organisasi dalam pengembangan karir akan menciptakan tempat kerja yang nyaman dan positif. Tempat kerja yang positif dapat mendongkrak semangat kerja pegawai, yang dapat mengurangi kemungkinan pegawai melakukan tindakan curang terhadap perusahaan.

5. Kode etik yang jelas, mudah dimengerti dan ditaati

Kode etik pada umumnya selalu sejalan dengan moral manusia dan merupakan perluasan dari prinsip-prinsip moral tertentu untuk diterapkan dalam suatu kegiatan. Membangun budaya jujur, keterbukaan dan memberikan program bantuan tidak dapat diciptakan tanpa memberlakukan aturan perilaku dan kode etik di lingkungan pegawai. Harus dibuat kriteria apa saja yang dimaksud dengan perilaku jujur dan tidak jujur, perbuatan yang diperbolehkan dan yang dilarang. Semua ketentuan ini dibuat secara tertulis

dan diinternalisasikan (disosialisasikan) ke seluruh karyawan dan harus mereka setuju dengan membubuhkan tanda tangannya. Pelanggaran atas aturan perilaku kode etik harus dikenakan sanksi.

6. Program bantuan kepada pegawai yang mendapatkan kesulitan  
Masalah ataupun kesulitan pasti akan dialami oleh setiap pegawai atau karyawan pada setiap perusahaan, sehingga tidak sedikit dari mereka yang melakukan berbagai macam kecurangan guna keluar dari masalah yang dihadapinya dalam masalah keuangan akibat desakan ekonomi yang ada, penyimpangan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Bentuk perhatian dan bantuan tersebut sebaiknya dapat diberikan kepada pegawai guna mencegah adanya kecurangan serta penyelewangan terhadap keuangan perusahaan, serta menjadi dukungan dan solusi dalam menghadapi permasalahan dan desakan ekonomi yang dimiliki para pegawai sehingga dapat meminimalisir kerugian perusahaan terhadap kecurangan.
7. Tanamkan kesan bahwa setiap tindakan kecurangan akan mendapatkan sanksi setimpal  
Strategi pencegahan kecurangan yang terakhir yaitu dengan menanamkan kesan bahwa setiap tindakan kecurangan yang akan mendapatkan sanksi. Pihak perusahaan khususnya pihak manajemen perusahaan harus benar-benar menanamkan sanksi, maksudnya membuat dan menjalankan suatu peraturan terhadap setiap tindak kecurangan yang ada sehingga, perbuatan menyimpang dalam perusahaan dapat diminimalisir, dan memberikan efek jera terhadap oknum yang akan ataupun yang sudah melakukan tindakan curang. Pencegahan kecurangan lebih baik dari pada mengatasi kecurangan, oleh karena itu perlu kerjasama yang baik bersamasama pada setiap anggota organisasi perusahaan guna mensejahterakan suatu perusahaan, karena apabila suatu perusahaan dapat berkembang dan maju menjadi lebih baik, maka sejahtera pula seluruh karyawan yang ada dalam perusahaan. Serta apabila seluruh bagian karyawan dapat menjalankan tugasnya sebaik mungkin, maka dapat pula melatih moral, etika serta teladan yang baik pada jiwa setiap karyawan.”

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas, dapat diinterpretasikan bahwa tujuan pencegahan kecurangan adalah meningkatkan keandalan laporan keuangan, efisiensi operasional, dan kepatuhan hukum. Penting menciptakan budaya jujur dan terbuka yang mendukung kerjasama. Pengendalian dimulai dari rekrutmen selektif, pelatihan kewaspadaan, dan lingkungan kerja positif. Kode etik yang jelas

dan bantuan bagi pegawai yang kesulitan dapat mencegah kecurangan. Sanksi tegas memberi efek jera dan menjaga perilaku sesuai nilai organisasi.

#### **2.1.5.7 Pencegahan Kecurangan Yang Efektif**

Menurut Raditya Arindya (2019:64) efektivitas adalah :

“Efektivitas organisasi adalah tingkat keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya dengan menggunakan secara optimal alat-alat dan sumber-sumber yang ada.”

Sejalan dengan hal tersebut, pencegahan kecurangan yang efektif adalah pencegahan yang sesuai dengan tujuannya. Menurut Amin Widjaja Tunggal (2016:33) tujuan pencegahan kecurangan yang efektif adalah :

1. “Menciptakan iklim budaya jujur, keterbukaan, dan saling membantu.
2. Proses rekrutmen yang jujur.
3. Pelatihan kesadaran akan penipuan (*fraud awareness*).
4. Lingkup kerja yang positif.
5. Kode etik yang jelas, mudah dimengerti, dan ditaati.
6. Program bantuan kepada pegawai yang mendapat kesulitan.
7. Tanamkan kesan bahwa setiap tindak kecurangan akan mendapatkan sanksi setimpal.”

## **2.2 Kerangka Pemikiran**

### **2.2.1 Pengaruh Peran Komite Audit terhadap Efektivitas Pencegahan Kecurangan**

Menurut Jen Surya dan Ridwan Saleh (2020:43) pengaruh peran komite audit terhadap pencegahan kecurangan adalah :

“Komite audit memiliki pengaruh dalam pencegahan kecurangan dengan menerima hasil investigasi atau pemeriksaan khusus atas dugaan pelanggaran atau internal *fraud* yang melibatkan staf, yang dilakukan apabila diperlukan, dan disampaikan oleh pihak terkait kepada direktur utama dan dewan komisaris melalui komite audit.”

Menurut Suhardi (2022:78) pengaruh peran komite audit terhadap pencegahan kecurangan adalah :

“Komite audit harus dijalankan secara rutin dan tetap dikedepankan dalam rangka menciptakan budaya jujur dalam organisasi/perusahaan, sehingga dapat mengurangi persepsi dari staf tentang adanya kesempatan untuk melakukan *fraud*.”

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas, dapat diinterpretasi bahwa komite audit berperan dalam mencegah kecurangan dengan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas dugaan pelanggaran dan menyampaikannya kepada pimpinan perusahaan. Selain itu, pelaksanaan tugas komite secara rutin membantu membangun budaya jujur di lingkungan kerja, sehingga mengurangi peluang dan dorongan bagi karyawan untuk melakukan kecurangan.

### 2.2.2 Pengaruh Kompetensi Auditor Internal terhadap Efektivitas Pencegahan Kecurangan

Menurut *The Institute of Internal Auditors (IIA)* (2024:7) yang diakses secara *online* pengaruh kompetensi auditor internal terhadap pencegahan kecurangan adalah:

“Auditor internal bertanggung jawab untuk terus mengembangkan dan menerapkan kompetensi yang diperlukan untuk memenuhi tanggung jawab profesionalnya. Selain itu, *chief audit executive* harus memastikan bahwa fungsi audit internal secara kolektif memiliki kompetensi untuk melaksanakan jasa audit internal yang dijelaskan dalam piagam audit internal atau harus memperoleh kompetensi yang diperlukan untuk mencegah risiko yang meluas (*pervasive risks*), seperti *fraud*.”

Selain itu, menurut *Urton L. Anderson* (2017:1) yang diakses secara *online*, pengaruh kompetensi auditor internal terhadap pencegahan kecurangan adalah :

“*Understanding the behavioral characteristics of potential fraudsters helps internal auditors stay alert for those situations in which fraud is most likely. This sense of alertness, coupled with a heightened professional skepticism, can help internal auditors prevent or deter potentially fraudulent actions, and detect timely those incidents that have occurred.*”

Kutipan tersebut dapat diartikan bahwa, memahami karakteristik perilaku calon pelaku kecurangan membantu auditor internal tetap waspada terhadap situasi di mana kecurangan kemungkinan besar terjadi. Rasa kewaspadaan ini, jika dipadukan dengan skeptisisme profesional yang tinggi, dapat membantu auditor internal untuk mencegah atau menghalangi tindakan kecurangan yang berpotensi terjadi, serta mendeteksi secara tepat waktu insiden yang telah terjadi.

Menurut Dewi Indriasih (2020:67) pengaruh kompetensi auditor internal terhadap pencegahan kecurangan adalah :

“Auditor internal wajib mempunyai kompetensi yang memadai untuk dapat mengenali, mengkaji dan menguji adanya indikasi penyimpangan memberikan informasi kepada auditor internal tentang cara auditor internal melakukan pencegahan, deteksi dan investigasi penipuan.”

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas, dapat diinterpretasi bahwa kompetensi auditor internal berperan dalam mencegah kecurangan dengan membantu mengidentifikasi dan menilai tanda-tanda penyimpangan secara akurat. Dengan pengetahuan yang cukup dan sikap skeptis, auditor dapat lebih waspada terhadap situasi rawan kecurangan serta melakukan deteksi dan investigasi secara tepat. Hal ini membuat potensi kecurangan bisa dicegah lebih awal dan risiko kerugian dapat diminimalkan.

### **2.2.3 Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Digital terhadap Efektivitas Pencegahan Kecurangan**

Menurut David Pajung (2022:40) pengaruh pemanfaatan teknologi digital terhadap pencegahan kecurangan adalah :

“Pengembangan teknologi informasi *Information Technology (IT)* beserta segala sistem yang terkomputerisasi dan terintegrasi akan mempersempit ruang dan kesempatan kecurangan yang diinternal perusahaan. Karena setiap data informasi dan laporan akan terekam dalam database dan juga sistem keamanan yang membuat akses pada data penting hanya terbatas pada orang yang punya otoritas.”

Menurut Sastya Hendri Wibowo (2023:123) pengaruh pemanfaatan teknologi digital terhadap pencegahan kecurangan adalah ;

“Sistem yang terdigitalisasi melalui teknologi digital dapat mendukung pencegahan kecurangan dengan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keamanan data.”

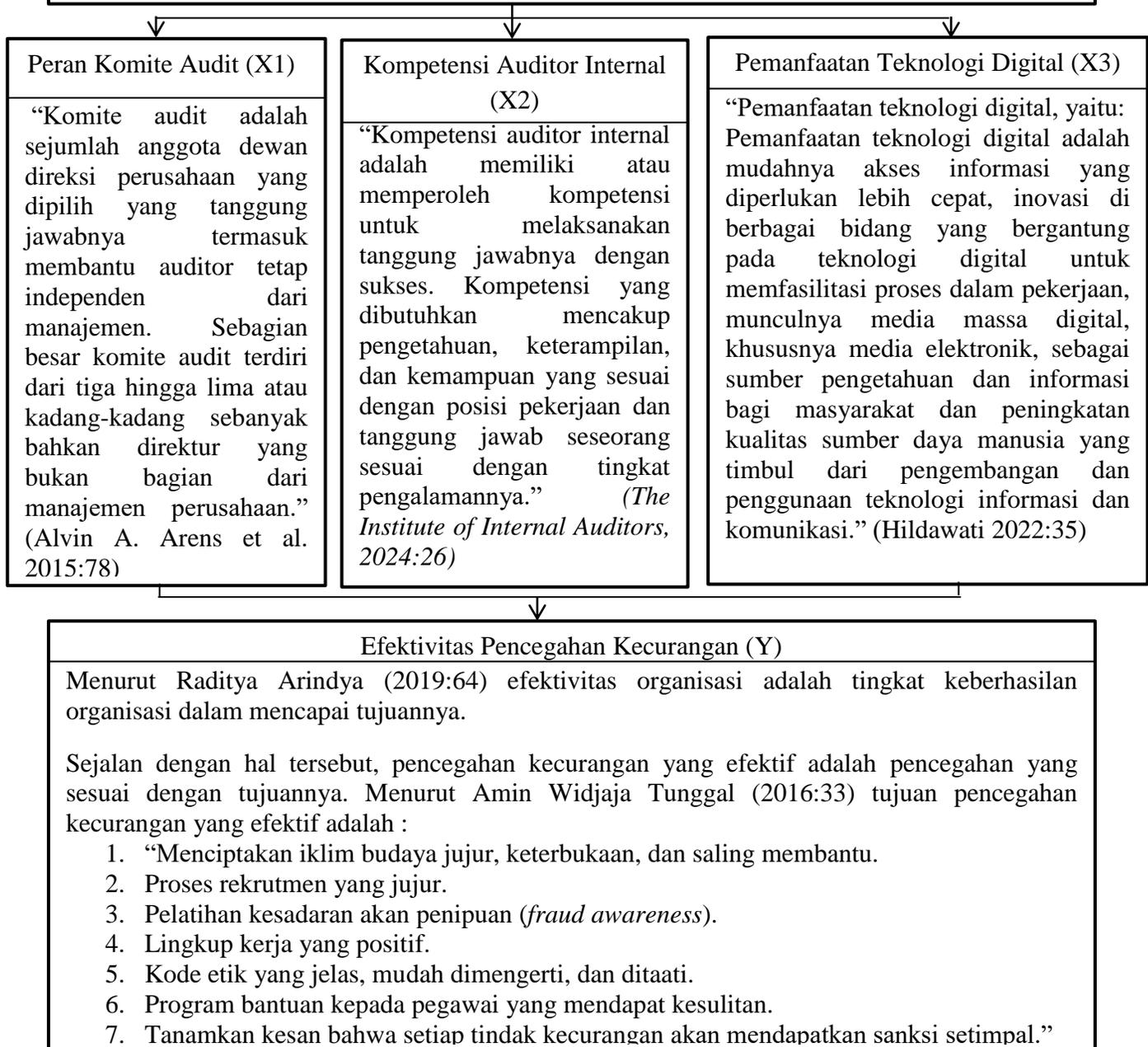
Berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas, dapat diinterpretasi bahwa pemanfaatan teknologi digital berperan penting dalam memperkecil peluang terjadinya kecurangan di lingkungan perusahaan. Teknologi digital, dengan sistem yang terkomputerisasi dan terdigitalisasi, tidak hanya membatasi akses terhadap informasi sensitif melalui sistem otorisasi, tetapi juga mendorong terciptanya lingkungan yang lebih transparan, akuntabel, efisien, dan aman, sehingga ruang gerak pelaku kecurangan menjadi semakin sempit.

### 2.2.4 Bagan Kerangka Pemikiran

Pencegahan kecurangan merupakan cara yang paling efektif untuk mengurangi kerugian akibat kecurangan (Amin Widjaja Tunggal, 2016:36).

Menurut Eko Sudarmanto (2021:215) upaya pencegahan kecurangan dapat dilakukan sebagai berikut :

1. Menciptakan dan mengembalikan budaya menghargai kejujuran dan nilai etika yang tinggi.
2. Penerapan dan evaluasi proses pengendalian *anti fraud*.



### 2.2.5 Hasil Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini dipaparkan dalam Tabel 2.1 sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Ringkasan Penelitian Terdahulu**

No	Nama Penelitian dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Lenda Komala dan Masagus Asaari (2022)	Analisis peran satuan pengawasan internal dan komite audit terhadap pencegahan kecurangan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, komite audit, audit internal, dan sistem pelaporan pelanggaran berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan pada perusahaan sub sektor Perdagangan Besar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2019. Menggunakan metode kuantitatif dan analisis regresi linier berganda, hasil uji t menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut berpengaruh signifikan, dengan nilai signifikansi di bawah 0,05. Uji F juga menunjukkan bahwa secara bersama-sama, ketiga variabel tersebut berpengaruh signifikan, dengan nilai signifikansi 0,0006. Temuan ini memberikan wawasan bagi perusahaan dalam merumuskan kebijakan pencegahan kecurangan.

2.	Ike Trijayanti, Nedi Hendri dan Gustin Padwa Sari (2021)	Pengaruh Komite Audit, Audit Internal, dan <i>Whistleblowing</i> System Terhadap Pencegahan <i>Fraud</i>	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, komite audit, audit internal, dan sistem <i>whistleblowing</i> berpengaruh positif terhadap pencegahan <i>fraud</i> pada perusahaan sub sektor Perdagangan Besar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2019. Menggunakan metode kuantitatif dan analisis regresi linier berganda, hasil uji t menunjukkan bahwa ketiga variabel independen berpengaruh signifikan, dengan nilai signifikansi masing-masing di bawah 0,05. Uji F juga menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut berpengaruh signifikan secara simultan, dengan nilai signifikansi 0,0006. Penelitian ini memberikan implikasi penting bagi perusahaan dalam merumuskan kebijakan pencegahan <i>fraud</i> .
3.	Mardani, Yesi Mutia Basri dan M Rasuli (2020)	Pengaruh Komite Audit, Audit Internal, dan Ukuran Perusahaan terhadap Pengungkapan Kecurangan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa komite audit memiliki pengaruh signifikan terhadap pengungkapan kecurangan pada perusahaan perbankan di BEI tahun 2017–2018. Semakin besar komite audit, tingkat pengungkapan

		pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI 2018	kecurangan cenderung meningkat. Sebaliknya, audit internal tidak menunjukkan pengaruh signifikan, sehingga ukuran audit internal tidak terlalu berpengaruh terhadap pengungkapan kecurangan. Sementara itu, ukuran perusahaan berpengaruh nyata, di mana perusahaan yang lebih besar cenderung memiliki tingkat pengungkapan kecurangan yang lebih tinggi.
4.	Risma Choirunnisa dan Yanti Rufaedah (2022)	Pengaruh Kompetensi Auditor dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Pendeteksian <i>Fraud</i>	Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa, kompetensi auditor memiliki dampak signifikan dalam mendeteksi kecurangan, sementara penggunaan teknologi informasi tidak berpengaruh secara signifikan. Hasil uji statistik menunjukkan bahwa data yang digunakan valid dan reliabel, dengan model regresi menunjukkan hubungan yang kuat antara variabel independen dan dependen, serta koefisien determinasi sebesar 59,3%. Secara keseluruhan, kompetensi auditor terbukti memainkan peran penting dalam deteksi kecurangan, sementara teknologi informasi tidak memberikan pengaruh yang signifikan.

5.	Try Wahyu Lianto dan Pupung Purnamasari (2021)	Pengaruh <i>Whistleblowing System</i> dan Kompetensi Auditor terhadap Pencegahan <i>Fraud</i>	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, <i>whistleblowing system</i> dan kompetensi auditor internal secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pencegahan <i>fraud</i> . Metode yang digunakan adalah deskriptif verifikatif dengan pendekatan kuantitatif, dan data diperoleh melalui kuesioner berbasis skala Likert. Populasi penelitian mencakup seluruh BUMN di Kota Bandung, dengan sampel 35 responden yang dipilih menggunakan teknik non-probability sampling. Hasil regresi linier berganda menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,001 untuk <i>whistleblowing system</i> dan 0,040 untuk kompetensi auditor internal, keduanya di bawah 0,05. Artinya, semakin efektif sistem pelaporan dan semakin kompeten auditor internal, maka pencegahan <i>fraud</i> akan semakin meningkat.
6.	Rina Hasanah (2022)	Pengaruh Kompetensi Auditor Internal terhadap Pencegahan Kecurangan pada Bank BJB	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, kompetensi auditor internal berkontribusi sebesar 46,4% terhadap upaya pencegahan kecurangan di Bank BJB Syariah Bandung, sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Artinya, semakin tinggi kompetensi

		Syariah Kantor Pusat Bandung dan Bank BJB Syariah Kantor Cabang Bandung	auditor internal, semakin kuat pula pencegahan terhadap kecurangan. Penelitian ini menyarankan agar Bank BJB Syariah terus meningkatkan kompetensi auditor internal untuk memperkuat langkah-langkah pencegahan kecurangan.
7.	Rizka Khoirotun Nisaa, Salsabila Maulidya Supriadi Bahrim dan Irda Agustin Kustiwi (2024)	Teknologi Digital Dan Transformasi Internal Audit Terhadap Perlakuan Laporan Keuangan : Studi Literatur	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, penerapan teknologi digital dan transformasi audit internal memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kualitas akuntansi, pengungkapan tata kelola, serta mempercepat proses audit. Teknologi kecerdasan buatan ( <i>AI</i> ) dan <i>Internet of Things (IoT)</i> dalam audit internal dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan, memperbaiki transparansi, dan membantu identifikasi pelanggaran secara lebih cepat.
8.	Azah Tul Muazah, Ade Sumarni dan Dien Noviany Rahmatika (2024)	Pentingnya Audit Internal dan Implementasi Teknologi untuk Mencegah Fraud di <i>Era Transformasi Digital</i>	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, peran audit internal dalam dan teknologi sangat penting dalam mengendalikan <i>fraud</i> . Mereka dapat menjalankan fungsinya secara efektif jika mampu mencegah, mendeteksi, menyelidiki, memantau, dan mengevaluasi tindakan fraud serta menindaklanjutinya. Pemanfaatan

			<p>teknologi digital, seperti software audit dan sistem informasi akuntansi, diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Teknologi informasi juga membantu perusahaan merespons kebutuhan bisnis dengan cepat dan akurat, mempermudah deteksi kesalahan.</p>
--	--	--	---

**Tabel 2.2**  
**Matriks Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Penulis**

Peneliti	Tahun	Komite Audit	Kompetensi Auditor	Pemanfaatan Teknologi Digital	Pendeteksian <i>Fraud</i>	Satuan Pengawasan Internal	Audit Internal	Transformasi Internal Audit	Perlakuan laporan keuangan	Whistleblowing System	Teknologi Informasi	Ukuran Perusahaan	Pencegahan Kecurangan
Lenda Komala dan Masagus Asaari	2022	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓
Ike Trijayanti, Nedi Hendri dan Gustin Padwa Sari	2021	✓	-	-	-	-	✓	-	-	✓	-	-	✓
Mardani, Yesi Mutia Basri dan M Rasuli	2020	✓	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	✓	-

Risma Choirunnisa dan Yanti Rufaedah	2022	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	✓	-
Try Wahyu Lianto dan Pupung Purnamasari	2020	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	✓
Rina Hasanah	2021	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	✓
Rizka Khoirotun Nisaa, Salsabila Maulidya Supriadi Bahrim dan Irda Agustin Kustiwi	2024	-	-	✓	-	-	-	✓	✓	-	-	-
Azah Tul Muazah, Ade Sumarni dan Dien Noviany Rahmatika	2024	-	-	✓	-	-	✓	-	✓	-	-	-
Alzira Tunggal Asmara	2025	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	✓

Keterangan :

Tanda ✓ = Diteliti

Tanda - = Tidak Diteliti

## **Deskripsi Persamaan dan Perbedaan Hasil Penelitian Terdahulu dengan**

### **Penulis :**

Berdasarkan tabel hasil penelitian terdahulu diatas, terdapat persamaan dari setiap variabel-variabel yang diteliti oleh penulis dengan penelitian yang sebelumnya, adapun persamaan variabel yaitu peran komite audit, kompetensi auditor internal, pemanfaatan teknologi digital dan efektivitas pencegahan kecurangan dengan penelitian Lenda Komala dan Masagus Asaari (2022), Ike Trijayanti, Nedi Hendri dan Gustin Padwa Sari (2021), Mardani, Yesi Mutia Basri dan M Rasuli (2020), Risma Choirunnisa dan Yanti Rufaedah (2022), Try Wahyu Lianto dan Pupung Purnamasari (2020), Rina Hasanah (2021), Rizka Khoirotun Nisaa, Salsabila Maulidya Supriadi Bahrim dan Irda Agustin Kustiwi (2024) dan Azah Tul Muazah, Ade Sumarni dan Dien Noviany Rahmatika (2024).

Penelitian ini merupakan pengembangan dari beberapa penelitian di atas tersebut dengan judul Pengaruh Peran Komite Audit, Kompetensi Auditor Internal dan Pemanfaatan Teknologi Digital terhadap Pencegahan Kecurangan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang direplikasikan adalah variabel dan lokasi yang diteliti. Pada penelitian Lenda Komala dan Masagus Asaari (2022) variabel yang digunakan hanya mencakup peran satuan pengawasan internal dan komite audit terhadap pencegahan kecurangan, sedangkan penulis menambahkan variabel kompetensi auditor internal dan pemanfaatan teknologi digital.

Pada penelitian Ike Trijayanti, Nedi Hendri, dan Gustin Padwa Sari (2021) variabel yang digunakan mencakup komite audit, audit internal, dan whistleblowing

system terhadap pencegahan *fraud*, sedangkan penulis menggunakan variabel komite audit, kompetensi auditor internal, dan pemanfaatan teknologi digital.

Pada penelitian Mardani, Yesi Mutia Basri, dan M. Rasuli (2020) objek penelitian difokuskan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2018, dengan variabel komite audit, audit internal, dan ukuran perusahaan terhadap pengungkapan kecurangan. Sementara itu, penulis meneliti pada perusahaan BUMN, dengan menggunakan variabel peran komite audit, kompetensi auditor internal, dan pemanfaatan teknologi digital terhadap efektivitas pencegahan kecurangan.

Pada penelitian Risma Choirunnisa dan Yanti Rufaedah (2022), variabel yang digunakan adalah kompetensi auditor dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap pendeteksian *fraud*. Sedangkan penulis menggunakan variabel komite audit, kompetensi auditor internal, dan pemanfaatan teknologi digital dengan fokus terhadap pencegahan kecurangan.

Pada penelitian Try Wahyu Lianto dan Pupung Purnamasari (2020) variabel yang digunakan adalah whistleblowing system dan kompetensi auditor terhadap pencegahan *fraud*. Sedangkan penulis menggunakan variabel komite audit, kompetensi auditor internal, dan pemanfaatan teknologi digital.

Pada penelitian Rina Hasanah (2021) hanya digunakan satu variabel yaitu kompetensi auditor internal terhadap pencegahan kecurangan dengan objek terbatas pada Bank BJB Syariah di Kota Bandung. Sedangkan penulis menggunakan tiga variabel, yaitu komite audit, kompetensi auditor internal, dan pemanfaatan teknologi

digital terhadap pencegahan kecurangan dengan fokus penelitian, yaitu pada perusahaan BUMN.

Pada penelitian Rizka Khoirotun Nisaa, Salsabila Maulidya Supriadi Bahrim, dan Irda Agustin Kustiwi (2024), variabel yang digunakan teknologi digital dan transformasi internal audit terhadap perlakuan laporan keuangan. Sedangkan penulis menggunakan tiga variabel, yaitu peran komite audit, kompetensi auditor internal, dan pemanfaatan teknologi digital terhadap pencegahan kecurangan.

Pada penelitian Azah Tul Muazah, Ade Sumarni, dan Dien Noviany Rahmatika (2024) variabel yang digunakan peran audit internal dan implementasi teknologi dalam mencegah *fraud*, dengan pendekatan yang lebih umum pada era transformasi digital. Sedangkan penulis menggunakan tiga variabel, yaitu peran komite audit, kompetensi auditor internal, dan pemanfaatan teknologi digital terhadap pencegahan kecurangan.

### **2.3 Hipotesis Penelitian**

Menurut Sugiyono (2023:99) pengertian hipotesis adalah:

“Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.”

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diuraikan di atas, maka peneliti mencoba merumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H1 : Peran Komite Audit, Kompetensi Auditor Internal dan Pemanfaatan Teknologi Digital terhadap Efektivitas Pencegahan Kecurangan

H2 : Peran Komite Audit berpengaruh terhadap Efektivitas Pencegahan Kecurangan

H3 : Kompetensi Auditor Internal berpengaruh terhadap Efektivitas Pencegahan Kecurangan

H4 : Pemanfaatan Teknologi Digital berpengaruh terhadap Efektivitas Pencegahan Kecurangan